



ISSN 1693-0231



INDONESIA

KONTRIBUSI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGERA



DAN Momen HARI BELA NEGARA

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PEMUKIMAN, DAN PEKERJAAN

ENERGI LISTRIK
INFRASTRUKTUR KRITIS
DAN KEAMANAN NASIONAL

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BELA NEGARA
PADA PEMBENTUKAN KARAKTER
DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)





**SELAMAT
HARI BELA NEGARA**

19 DESEMBER 2019

PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA

MELALUI

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Di akhir edisi Wira Kemhan untuk tahun 2019 Kami menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi bulan November-Desember 2019 Volume VI Nomor 6.

Dalam edisi ini tim redaksi akan mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Kontribusi Syafruddin Prawiranegara dan Momen Hari Bela Negara; Upaya Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dilingkungan Pendidikan, Pemukiman Dan Pekerjaan; Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Pada Pembentukan Karakter di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) serta Energi Listrik, Infrastruktur Kritis dan Keamanan Nasional; dan berita-berita tentang Kemhan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2019
Vol. VI / No. 6

Diterbitkan oleh:
Biro Humas Setjen Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat :

Menteri Pertahanan
Letjend TNI (Purn)
H. Prabowo Subianto

Sekjen Kemhan
Laksdyta TNI
Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pimpinan Umum :

Karo Humas Setjen Kemhan
Brigjen TNI
Totok Sugiharto, S. Sos.

Pimpinan Redaksi :

Kabag Infopublikata Biro Humas
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi :

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis :

Imam Rosyadi
Mandiri Triadi, S.Sos.
Fadilah Ferdian

Foto :

Fotografer Biro Humas
Saifulloh

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Daftar Isi

ARTIKEL

5 /

KONTRIBUSI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DAN MOMEN HARI BELA NEGARA

kontribusi Syafruddin terhadap kelangsungan RI tidak bisa diukur karena saking besarnya membuat Belanda harus mengubur mimpiya ingin kembali bercokol di Nusantara. Bayangkan, andai saja Syafruddin tidak tergerak membentuk PDRI kala Sukarno-Hatta ditawan Belanda maka otomatis negeri ini sudah dikuasai oleh negara penjajah.



9 / UPAYA PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DILINGKUNGAN PENDIDIKAN, PEMUKIMAN DAN PEKERJAAN

14 / IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BELA NEGARA PADA PEMBENTUKAN KARAKTER DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

22 / ENERGI LISTRIK, INFRASTRUKTUR KRITIS DAN KEAMANAN NASIONAL

BERITA PERTAHANAN

30 / MENHAN HADIRI RAPAT PERDANA DENGAN KOMISI I DPR RI

31 / HADIRI ADMM RETREAT, MENHAN RI SAMPAIKAN KOMITMEN INDONESIA WUJUDKAN ASIA TENGGARA YANG AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA

34 / WAMENHAN MEMBERIKAN KEYNOTE SPEECH PADA KEGIATAN GOESMART 2019

35 / KEMHAN RI RAIH ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BADAN PUBLIK YANG CUKUP INFORMATIF

36 / UPACARA HUT KORPRI KE-48 WAMENHAN BACAKAN SAMBUTAN PRESIDEN RI.

37 / BUKA PAMERAN PRODUK INDHAN SWASTA NASIONAL, MENHAN OPTIMIS KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Kontribusi Syafruddin Prawiranegara dan Momen Hari Bela Negara

Oleh:

Erik Purnama Putra

Jurnalis Republika dan

Mahasiswa Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina



sumber foto: maulanusantara.wordpress.com

Dibandingkan dengan peringatan hari besar yang mengandung nilai kesejahteraan tinggi, peringatan Hari Bela Negara (HBN) jelas kalah gaungnya. Padahal, HBN merupakan peristiwa super penting yang layak diperingati secara besar-besaran oleh bangsa ini setiap tahunnya. Pasalnya, ada kandungan sarat pesan dan semangat besar dari para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang tidak pantang menyerah meski Belanda telah menguasai ibu kota Republik Indonesia (RI) kalau itu di Yogyakarta. Namun, berkat tekad dan perjuangan Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan (dkk) maka pemerintahan Indonesia yang sudah lumpuh di Yogyakarta, yang ditandai dengan ditangkapnya Sukarno-Hatta masih bisa diteruskan di Bukittinggi Sumatra Barat.

Pada 19 Desember 1948 Agresi Militer Belanda II yang didukung pasukan militer dengan peralatan lengkap berhasil

meluluhanlantakkan Yogyakarta. Hal Yogyakarta, Syafruddin bersama itu sama saja ibu kota negara Panglima Tentara dan Teritorium berada dalam cengkeraman Sumatra Kolonel Hidayat penjajah. Untuk memproklamasikan mengunjungi Gubernur Sumatra/kemenangannya, Belanda berulang Ketua Komisaris Pemerintah kali menyiarkan berita itu lewat Pusat Teuku Mohammad Hasan di radio dengan menyatakan RI kediamannya. Ketiga tokoh tersebut sudah dikalahkan. Propaganda itu pun mengadakan perundingan wajib disiarkan hingga ke negara dalam waktu singkat. Hasilnya, luar untuk membuktikan kalau mereka meninggalkan Bukittinggi Belanda sudah kembali ke wilayah pada malam hari itu juga untuk tanah jajahannya yang sempat ditinggalkannya sejak 1942, ketika Belanda kalah dari Jepang. Otomatis dengan keadaan tersebut, negara yang baru merdeka sekitar tiga tahun lalu itu dianggap bubar atau lenyap. Apalagi, Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi simbol pemimpin RI sudah ditawan dan dibuang ke Pulau Bangka, sehingga nasib bangsa ini diujung tanduk.

Namun, siasat yang sudah dirancang dengan baik oleh para pendiri bangsa mulai dijalankan. ketiga tokoh itu bersama Sutan Di sebuah tempat yang berjarak Muhammad Rosjid, Lukman Hakim, sekitar 1.900 kilometer (km) dari Indracayya, Mananti Sitompul,

Berkat komunikasi yang terjalin baik, tokoh pimpinan RI yang berada di Sumatra Barat berkumpul di Halaban. Berselang tiga hari sejak Yogyakarta dikuasai Belanda atau pada 22 Desember 1948, ketiga tokoh itu bersama Sutan Muhammad Rosjid, Lukman Hakim, sekitar 1.900 kilometer (km) dari Indracayya, Mananti Sitompul,



Gambar: Syafruddin Prawiranegara

Maryono Danubroto, A Karim, Rusli Rahim, dan Latif menyusun konsep sebuah pemerintahan. Mereka berani berinisiatif melakukan itu lantaran keadaan negara dalam posisi genting. Karena itu, meskipun kawat kiriman dari Presiden Sukarno belum diterima Syafruddin dkk, namun sesuai konsep yang telah disusun secara matang, rapat tersebut menghasilkan keputusan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Tugas PDRI adalah menggantikan sementara pemerintahan RI secara resmi, hingga Sukarno-Hatta dapat kembali menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Hasil perundingan para tokoh di pedalaman Sumatra Barat tersebut memutuskan Syafruddin menjabat sebagai Ketua atau Presiden PDRI. Adapun Mohammad Hasan ditunjuk menjadi Wakil Ketua PDRI. Sehari berselang atau pada 23 Desember 1948, laki-laki kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911, ini mengumumkan terbentuknya PDRI lengkap dengan susunan kabinet. Syafruddin juga berpidato untuk membakar semangat rakyat Indonesia. Dengan sisa-sisa kekuatan dan senjata yang dimiliki, Syafruddin berusaha memotivasi tentara dan masyarakat untuk selalu semangat melawan penindasan yang dilakukan Belanda sekaligus untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

Sontak saja, pidato itu membuat geram jajaran pemimpin Belanda yang sudah menguasai Yogyakarta. Hal itu dapat dimaklumi lantaran Syafruddin berusaha menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemerintahan RI masih eksis. Apalagi, pidato

"Kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali mleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti!"

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh!"

lewat radio itu bisa disadap radio Belanda di kawasan Riau dan sinyalnya ditangkap stasiun radio Singapura. Sejak deklarasi PDRI menggantikan pemerintahan Sukarno-Hatta, Syafruddin menjadi sosok nomor satu yang diincar Belanda. Pergerakannya pun terus dipantau hingga ia harus kerap menyamar untuk menghindari pengendusan laporan mata-mata Belanda. Keluar masuk hutan menjadi keseharian Syafruddin demi berjuang menjaga RI tetap tegak berdiri.

Beberapa bulan

berselang atau pada pertengahan 1949, posisi militer Belanda semakin tidak menguntungkan. Dunia internasional mengecam Agresi Militer Belanda II, yang menganeksasi sebuah negara yang sudah berdaulat. Setelah itu dilakukan Perundingan Roem-Royen, yang berisi kesepakatan militer kedua belah pihak menghentikan aktivitasnya. Pada 13 Juli 1949, Syafruddin menghadiri sidang pertemuan dengan Sukarno-Hatta dan menteri kabinet, hingga diambil keputusan pembubaran PDRI. Secara resmi, Syafruddin mengembalikan mandat sebagai orang nomor satu di RI kepada Hatta yang menjabat Wakil Presiden otomatis menjadi Perdana Menteri, lantaran kabinetnya belum dibubarkan.

Apa pesan yang bisa diambil dari peristiwa itu? Di sini sangat jelas kepahlawanan Syafruddin yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan RI. Tanpa dia, bisa jadi saat itu Belanda kembali menjajah Nusantara yang baru seumur jagung merdeka dari Jepang. Namun, di tengah segala keterbatasan yang dimiliki, para pendiri bangsa itu bisa menunjukkan roda pemerintahan RI masih eksis. Sehingga, pengakuan kedaulatan negara lain terhadap RI dapat terus dijaga sebagai modal melanjutkan diplomasi.

Di luar kontroversi yang menaungi Syafruddin yang pernah terlibat di Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), bangsa ini jelas berutang budi kepadanya. Tanpa Pak Syaf, sapaan akrabnya, bisa jadi RI tidak memperingati hari kemerdekaan setiap 17 Agustus, karena Agresi Militer II yang dilancarkan Belanda kala itu, sudah melumpuhkan pemerintahan resmi. Namun, langkah antisipasi sudah dipersiapkan dengan matang oleh para tokoh yang bermarkas di Sumatra Barat. Kalau Dwitunggal tersebut akhirnya menjadi tawanan pasukan Kolonial Belanda maka harus ada orang yang meneruskannya. Selain Jenderal Besar Sudirman yang meneruskan perjuangan lewat perang gerilya di tengah hutan

lantaran enggan menyerah melawan militer Belanda, jasa besar Pak Syaf tidak bisa dinafikan.

Satu pelajaran lain yang bisa diteladani adalah ketika diplomasi internasional yang digawangi AA Maramis di India bisa menekan Belanda hingga harus membebaskan Sukarno-Hatta, PDRI juga berakhir. Pak Syaf dengan rela hati dan ikhlas menyerahkan kembali kewenangan yang dimiliki kepada Sukarno-Hatta. Dia yang sebenarnya secara de facto layak disebut sebagai Presiden ke-2 RI berkenan untuk tidak mempertahankan statusnya sebagai penguasa negeri ini. Dia menyadari, kewenangan yang diberikan kepadanya hanya bersifat sementara. Dari situ, dapat dinilai bahwa ketulusan dan pengorbanan Pak Syaf tidak bisa diukur lantaran perannya membuat RI tetap menjadi negara berdaulat sejak deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Edy Suandi Hamid dalam buku "Mr Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah" pada 2011, mengatakan, pada saat Belanda menganggap RI telah tamat, dibentuklah PDRI yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi negara ini. Kekosongan kekuasaan dapat mengakibatkan kevakuman yang memberikan dampak negatif terhadap kondisi rakyat Indonesia maupun hubungannya dengan luar negeri. Karena itu, pembentukan PDRI merupakan langkah sangat tepat karena dapat menyelamatkan Republik.

Mengacu hal itu, kontribusi Syafruddin terhadap kelangsungan RI tidak bisa diukur karena saking besarnya membuat Belanda harus mengubur mimpiinya ingin kembali bercokol di Nusantara. Bayangkan, andai saja Syafruddin tidak tergerak membentuk PDRI kala Sukarno-Hatta ditawan Belanda maka otomatis negeri

ini sudah dikuasai oleh negara penjajah. Mengingat betapa pentingnya peristiwa heroik tersebut, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2006 tentang pengakuan pemerintah terhadap peran PDRI sebagai bagian sejarah yang membawa keutuhan RI. Berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2006 itu pula, setiap 19 Desember kini diperingati sebagai Hari Bela Negara (HBN).

Hari Bela Negara

Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun menyadari kontribusi besar Syafruddin terhadap tegaknya RI. Karena itu, Kemhan memberikan apresiasi setinggi-tingginya dengan menambatkan nama Syafruddin Prawiranegara di salah satu gedung yang ditempati Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan). Hal itu menandakan sosok Syafruddin yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 2012, itu memang pantas untuk dihormati dan pencapaiannya layak dikenang.

Selain itu, Kemhan juga setiap 19 Desember selalu memperingati HBN untuk mengenang momen deklarasi pembentukan PDRI. Perayaan kerap digelar di berbagai daerah dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda) dan sebagian elemen masyarakat. Sayangnya, penulis menyoroti selama ini perayaan HBN terkesan kurang semarak dan hanya dijalankan oleh satu kementerian semata. Seharusnya, HBN diperingati oleh semua kementerian dan lembaga negara yang wajib terlibat di dalamnya agar gebyarnya diketahui seluruh masyarakat.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Karena kalau hanya Kemhan sendirian yang merayakannya dengan bergantian keliling daerah maka hal itu membuat hanya orang-orang tertentu saja yang memahami makna sejarah HBN. Pun kalau dilakukan hanya secara seremonial maka jadinya seolah mempersempit makna kelahiran HBN. Untuk itu, perayaan dan kegiatan HBN harus diperluas dan melibatkan semua lembaga negara supaya semakin banyak orang yang paham kandungan sejarah di dalamnya. Karena kalau perayaan itu terkesan hanya diurus Kemhan semata maka lambat laun orang beranggapan HBN hanya menjadi milik lembaga tertentu saja, sehingga masyarakat bisa tidak peduli karena tidak tahu.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk ikut terlibat dalam peringatan HBN supaya semakin banyak elemen masyarakat yang memahami betapa pentingnya peristiwa 19 Desember 1948. Karena kalau momen penting itu hanya dirayakan oleh segelintir aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian Tentara Nasional Indonesia (TNI), apalagi hanya dilakukan pejabat Kemhan maka lambat laun semakin banyak orang yang tidak mengetahui maksud HBN.

Karena itu, semua elemen masyarakat, khususnya siswa sekolah harusnya diajak untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perayaan HBN supaya momen itu diketahui khalayak luas. Dengan begitu, generasi muda jadi mengerti betapa dahulu ada pengorbanan besar yang diperjuangkan para pendiri bangsa demi tetap tegaknya RI. Di tengah semakin berkurangnya rasa nasionalisme akibat terkikis budaya asing yang menyerbu Indonesia, generasi muda wajib dikenalkan dan ditanamkan nilai-nilai kepahlawanan seperti yang dicontohkan Syafruddin.

Penulis patut mengapresiasi terobosan terbaru yang dilakukan Kemhan pada 2019, yang memiliki pendekatan berbeda dalam menggaet kaum muda untuk ikut terlibat dalam peringatan HBN. Langkah yang ditempuh Kemhan dengan mengadakan lomba vlog dan fotografi patut diacungi jempol, lantaran mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam HBN. Dengan membuat video terbaik dan foto yang merepresentasikan program bela negara maka masyarakat diajak untuk ikut memikirkan bagaimana metode efektif mengenalkan sejarah penting bangsa ini agar diketahui bersama.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pasalnya, program bela negara tidak melulu dilakukan dengan cara fisik, bisa juga dengan menyumbang ide keren lewat video kreatif atau menghasilkan foto yang memberi pesan mendalam tentang seseorang yang siap mengabdi dan membela negaranya dari ancaman apapun. Cara itu juga sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat, atau setidaknya mengetahui HBN adalah peristiwa sejarah yang tak bisa dilepaskan dari perjalanan RI.

Sehingga, pendekatan berbeda yang ditawarkan Kemhan dalam perayaan HBN tahun ini, layak diberi kredit, lantaran mengajak setiap individu berkontribusi menyumbang hasil karya terbaik.***

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DILINGKUNGAN PENDIDIKAN, PEMUKIMAN DAN PEKERJAAN

Oleh :
Dedi Kuswand, S.Sos.,M.M.
(Analis Pertahanan Negara Madya Set Baranahan)

Bela Negara merupakan sebuah konsep Nasionalisme dalam mempertahankan eksistensi negara yang disusun oleh perangkat perundungan. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, karakter, sosial maupun peningkatan kesejahteraan. Bela Negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembelaan negara Republik Indonesia bukan semata-mata tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesiya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang mempunyai Jiwa nasionalisme serta patriotisme sebagai aspek terpenting dalam keberadaan serta kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan tepat 17 Agustus 1945.

Bentuk kecintaan kepada suatu Negara-nya menjadi sebuah tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga Negara sebagai bentuk kontribusi terhadap wilayah tempat ia hidup dan berkehidupan. Makna mendalam ini tentunya bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk, akan tetapi semangat yang dibangun adalah semangat untuk senantiasa melakukan pengembangan diri dan pengembangan komunitas sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara. Semangat Bela Negara sudah sewajarnya dapat dibuktikan dalam melakukan bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu menjadikan sebuah Inspirasi bagi banyak orang. Mengejar prestasi secara akademik dengan pembuktian hasil yang memuaskan, merupakan bentuk Nasionalisme jika diiringi dengan semangat inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan masyarakat.

Dalam era globalisasi dewasa ini, keterbukaan informasi menyebabkan arus informasi tak terbendung masuk ke Indonesia. Berbagai budaya dan ideologi mulai dari ekstrim kiri (Komunisme) sampai dengan ekstrim kanan (Liberalism) juga menarik perhatian

negara kita dan mulai dipelajari serta dipahami. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah tergerusnya semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara serta seolah memudarnya semangat bela Negara. Sementara itu jika dilihat adanya perbedaan pendapat antar golongan ataupun ketidak setujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Meskipun berbagai tindakan anarkis konflik sara dan sparatisme yang terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi akan menimbulkan kesan tidak ada lagi semangat kebersamaan suatu bangsa, bahkan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi sudah menjadi tujuan utama.

Salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa adalah merevitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara. Strategi itu akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan Bela Negara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta maksimal. Diharapkan masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban serta memiliki kemampuan dasar bela negara.

Unsur-Unsur Bela Negara Dalam Diri Bangsa Indonesia

Unsur-unsur Bela Negara yang ada didalam diri Bangsa Indonesia, terdiri dari : Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.

Definisi lain mengatakan bahwa Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas



Sumber foto: Penulis

yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal sebagai generasi penerus bangsa. Rasa-rasa tersebut merupakan kita harus menjaga budaya dan cerminan dari perilaku individu tradisi yang ditinggalkan oleh untuk membela, menjaga dan nenek moyang, guna merawat melindungi tanah airnya, rela kemajemukan bangsa Indonesia. berkorban demi kepentingan Selain itu untuk meningkatkan bangsa dan negaranya, mencintai kembali rasa cinta tanah air dan melestarikan adat atau budaya yang ada dinegaranya serta melestarikan alam dan lingkungan.

Sementara itu dengan adanya arus globalisasi di era saat ini, akan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia baik secara positif ataupun negatif.

Terlepas dari adanya dampak

positif globalisasi, indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini terlihat terutama pada aspek budaya yang semakin luntur di kalangan kita sebagai masyarakat modern saat ini. Selain itu sikap patriotisme sebagai rasa cinta dan peduli terhadap bangsa juga sudah mulai menurun. Banyak kalangan masyarakat membeli barang-barang dari luar negeri hanya untuk membeli barang *branded*. Belum lagi ketika teknologi sudah semakin

modern akan menjadi ironis budaya dan tradisi khas Indonesia mulai bergeser oleh budaya asing.

Bagaimanapun juga keadaannya sebagai generasi penerus bangsa kita harus menjaga budaya dan cerminan dari perilaku individu tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang, guna merawat melindungi tanah airnya, rela kemajemukan bangsa Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan bangsa dan negaranya, mencintai kembali rasa cinta tanah air dan melestarikan adat atau budaya yang ada dinegaranya serta melestarikan alam dan lingkungan.

Kedua, rela berkorban. Memiliki rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara nasional merupakan hak dan kewajiban kepada sesama, serta mencintai produk-produk anak bangsa Indonesia.

Dengan tidak melanggar hukum, bersikap. Karena Pancasila yang merupakan hak dan kewajiban mutlak yang harus dipegang agar tidak hilang dan terbawa arus globalisasi. Untuk dapat mengatasinya, maka Pancasila sebagai akibat dari globalisasi tersebut, maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dan dasar negara mulai memudar. Rasa mencintai semua sebagai warga negara, harus tetap menjadi pijakan dalam produk Indonesia pun belakangan ini juga sudah mulai menurun. Banyak ikut melaksanakan tata tertib yang berlaku, ikut memelihara ketertiban dan mematuhi peraturan, itu beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara.

Keempat, memiliki kemampuan sesuatu tanpa dapat diukur oleh nilai. Sikap rela berkorban juga bisa diwujudkan dalam sikap tanpa mengharap imbalan, selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan mendahulukan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Ketiga, Yakin Pancasila sebagai ideologi Negara. Begitu besar makna dari Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita – cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yaitu ia merupakan kaidah penyelenggaraan negara yang bersifat *fundamental*, yang berarti Pancasila itu merupakan hukum dasar.

Sehubungan dengan arus globalisasi saat ini, yang mana tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas antar setiap bangsa Indonesia, maka rakyat dan bangsa Indonesia harus lebih bisa membuka diri. Permasalahan yang paling utama dihadapi pada era ini oleh Pancasila yaitu mengenai masalah penghayatan dan pengamalannya. Era keterbukaan sudah mulai mengakar kuat di era globalisasi sekarang ini. Oleh karena itu identitas nasional sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipegang agar tidak hilang dan terbawa arus globalisasi. Untuk dapat mengatasinya, maka Pancasila sebagai akibat dari globalisasi tersebut, maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dan dasar negara mulai memudar. Rasa mencintai semua sebagai warga negara, harus tetap menjadi pijakan dalam produk Indonesia pun belakangan ini juga sudah mulai menurun. Banyak ikut melaksanakan tata tertib yang berlaku, ikut memelihara ketertiban dan mematuhi peraturan, itu beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara.

Keempat, memiliki kemampuan awal Bela Negara. Disini artinya adalah masyarakat mempunyai kemampuan awal bela negara baik berlandasan keikhlasan dan psikis maupun fisik dalam menjamin ketulusan dalam melakukan kelangsungan hidup bangsa dan

Negara. Adapun indikator dari rasa pendidikan hingga lingkungan memiliki kemampuan Bela Negara tersebut, antara lain; senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga, terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Kemampuan

Bela Negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan upaya yang bermanfaat bagi seseorang ataupun bagi orang lain, yaitu tetap menjaga kesehatan fisik dan mental, kedisiplinan, ulet, serta bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Kelima, Sadar berbangsa dan bernegara. Salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara yang dapat diwujudkan oleh masyarakat nusantara dan keamanan nasional khususnya kalangan generasi muda yaitu dengan cara ikut membantu korban bencana. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Sebagaimana kita ketahui bahwa Pokok Hankam negara RI, diubah Wilayah Indonesia berada didaerah Ring Of Fire atau wilayah yang sering sekali mengalami bencana gempa bumi dan bencana alam lainnya.

Selain itu wujud kesadaran berbangsa dan bernegara bisa aktif untuk ikut menjaga kebersihan, minimal kebersihan dilingkungan tempat tinggal kita sendiri. Sebagai salah satu bentuk dampak dari kehidupan modern yang bersandar kepada gaya hidup asing, yakni semakin maraknya penggunaan dan peredaran bahaya Narkoba khususnya dikalangan generasi milenial saat ini. Oleh karena itu untuk mencapai kesadaran berbangsa dan bernegara maka upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa dapat dioptimalkan. Belum lagi dengan dampak besar globalisasi lainnya yakni aksi perkelahian atau tawuran baik yang dilakukan oleh siswa atau kelompok masyarakat tertentu. Wujud kesadaran berbangsa dan bernegara bisa di bentuk dalam upaya mencegah perkelahian atau aksi tawuran dengan melakukan aksi damai melalui penanaman budaya dan seni di lingkungan

Penguatan Unsur-Unsur Bela Negara.

Landasan Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945 yang menguatkan Bela Negara beserta unsur-unsurnya bagi warga Negara Indonesia dikuatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlindungan rakyat. Sejalan dengan waktu maka Bela Negara juga diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 1973, tentang konsep wawasan dapat diwujudkan oleh masyarakat nusantara dan keamanan nasional khususnya kalangan generasi dan dicantumkan pada Undang-

muda yaitu dengan cara ikut Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Sebagaimana kita ketahui bahwa Pokok Hankam negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988. Disamping itu beberapa peraturan lainnya juga mengutarakan tentang Bela Negara, seperti Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI, dan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 Ayat (1) dan

kepada gaya hidup asing, yakni (2). Pasal tersebut menyatakan "bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara

yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Ada juga pada Pasal 27 Ayat (3) : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Selanjutnya hak dan kewajiban Bela Negara terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 Ayat (1) : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara"; Ayat (2) : "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui :

- a. pendidikan Kewarganegaraan,
- b. pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68 : Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Masyarakat Dalam Upaya Bela Negara di Setiap Lingkungan Masyarakat

Lingkungan

Pemukiman.



Sumber foto : www.artakita.co.id

Keikutsertaan warga negara masyarakat dalam menangkal dibarengi oleh peningkatan dalam wujud upaya Bela Negara setiap ancaman sangat diharapkan ekonomi dan kesejahteraan melalui dilingkungan pemukiman dapat dilakukan. Hal ini lagi-lagi peningkatan keterampilan dan masyarakat dapat diselenggarakan dijadikan sebagai bukti nilai cinta melalui penyediaan lapangan melalui berbagai cara yang tanah air dalam Bela Negara pada pekerjaan yang luas di masyarakat bertumpu pada kesadaran akan lingkungan masyarakat. Salah satu perbatasan, sehingga mereka hak dan kewajibannya setiap contoh yang dapat digambarkan terhindar dari eksplorasi dari warganegara. Kesadaran Bela adalah hal yang sangat menonjol kelompok tertentu.

Negara secara terus menerus dapat akhir-akhir ini terjadi melalui

ditumbuh kembangkan dalam teknologi sistem siber yang makin bentuk rasa kebanggaan sebagai berkembang dan kompleks. Lingkungan pendidikan. Upaya peningkatan kesadaran bangsa Indonesia, sehingga timbul kepedulian untuk menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh kehidupan masyarakat dapat perlu melibatkan beberapa pihak, menggunakan perangkat lunak mulai dari perguruan tinggi, dan sistem informasi digital sekolah, masyarakat hingga level ruang wilayah Indonesia.

Disamping itu bentuk lainnya yang semakin terintegrasi pada pemerintah. Dengan memberikan adalah menjaga nama baik bangsa sektor kehidupan individu sampai sosialisasi dalam peningkatan dan negara Indonesia, memberikan kolektif. Hal ini tentunya sangat kesadaran Bela Negara maupun kontribusi dan kemajuan pada mempengaruhi kehidupan sosial implementasinya melalui kegiatan bangsa dan negara Indonesia, pada masyarakat sehingga Masa Orientasi Siswa (MOS) mencintai produk dalam negeri, peristiwa-peristiwa, baik serta program Organisasi Siswa budaya, dan kesenian Indonesia, radikalisme maupun kerusuhan Intra Sekolah (Osis) ataupun serta kesadaran akan berbangsa yang melibatkan kelompok tertentu Organisasi Kemahasiswaan. Selain dan bernegara. Yaitu, sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia kepada pihak lain. Sehubungan Negara juga dapat diintegrasikan dalam bentuk tingkah laku, sikap, dengan hal itu perlu kesadaran dalam rancangan kurikulum dan kehidupan pribadi agar dapat sikap dan kemampuan individu pembelajaran dan penerapan bermasyarakat sesuai dengan untuk secara tepat menggunakan, di dalam kelas. Disamping itu mengakses, mengelola dan penerapan diluar kelas bisa memperlihatkan bagaimana kerentanan kalangan generasi muda dari keterpengaruhannya ajaran yang disebarluaskan oleh kelompok radikal baik secara langsung maupun melalui media online yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Karena itulah kesadaran dalam upaya membentengi diri sendiri dan lingkungannya, menjauhkan dan menghindari serta menolak faham-faham dari keterpengaruhannya ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu Indikator pasang surutnya dari unsur kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diukur dari fakta-fakta yang disintegrasi bangsa. Seiring dengan hal tersebut ini dapat meningkatkan kesadaran bela Negara yang ditanamkan sejak usia sekolah agar kuat menghadapi kesadaran Bela Negara. Dengan budaya asing.



Sumber foto : alsel.kemenag.go.id

Lingkungan Kerja. Kepemilikan jiwa Bela Negara yang harus bisa diterapkan diseluruh lingkungan pekerjaan dan kehidupan. Arti penerapan di lingkungan pekerjaan adalah berarti dapat mengimplementasikan nilai Kompetensi, Integritas, Transparan dan Akuntabilitas, serta memiliki karakter yang kuat dan berkomitmen melakukan perubahan untuk lebih kompeten, Jujur, transparan serta dapat menjalankan aturan yang berlaku.

Adapun bentuk-bentuk penerapan lainnya yaitu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan emosional, kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya serta memiliki bentuk keterampilan bela negara.

Disisi lain implementasi dari pemantapan Bela Negara dilingkungan Kerja bisa dapat dilakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap kerja yang kondusif bagi penampilan kinerja pegawai, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Diklat pegawai ini didasarkan atas analisis kebutuhan yang memadukan kondisi nyata kualitas tertentu selaras dengan program rencana jangka panjang organisasi. Sementara itu sebagai akibat perkembangan zaman yang terus bergulir, dimana permasalahan yang dihadapi menjadi semakin kompleks dan krusial, maka hal-hal yang perlu dilengkapi dalam berbagai aspek untuk lingkungan kerja adalah dengan mengikuti diklat Bela Negara. Diklat Bela Negara ini akan menambah wawasan kebangsaan dan patriotisme bagi pegawainya, serta memantapkan aspek kompetensi pegawai dengan harapan kinerja pegawai tersebut dapat meningkat.

Dari seluruh rangkaian pembahasan diatas maka dapat dirangkum, bahwa kesadaran bela negara itu pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus (*Soft*), hingga yang paling keras (*Hard*).

Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya juga adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan Bela Negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI.

Kesadaran bela Negara akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas

sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan Sumber Daya Manusia/SDM untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Diharapkan adanya kesepahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa yang takterpisahkan dari pembangunan nasional. Juga dapat diprogramkan pada setiap institusi pemerintah dan non pemerintah.

Pada akhirnya Kedaulatan Negara akan tegak bila semua warga negaranya sadar dan memahami bagaimana mempertahankan Negara dengan profesi dilingkungannya masing masing. Sehingga Negara nantinya akan tangguh menghadapi semua bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri, seperti ancaman *proxy war*, *hybrid warfare*, *cyber & network centric warfare*, perang asimetris, sistem senjata teknologi tinggi, perang terbatas tapi berlarut.

Selain itu, dengan kesadaran Bela Negara berarti kita sudah mengedepankan untuk mencintai keluarga dan mengedepankan kasih sayang kepada anak-anak kita. Dengan mendidik dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita sesama yang berarti membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang***

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Hankam negara RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1988
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- Tap MPR No.VI Tahun 2000. Tentang Pemisahan TNI dengan POLRI
- Tap MPR No.VII Tahun 2000 Tentang Peranan TNI dan POLRI
- (<https://wp.lppmpjabar.go.id/2019/04/25/pengertian-rasa-cinta-tanah-air/>)

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BELA NEGARA PADA PEMBENTUKAN KARAKTER DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Oleh :

Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, SE., MM.

Dosen Universitas Pertahanan

(Sesprodi Doktoral Fakultas Keamanan Nasional, Unhan)

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Melalui pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional serta menghasilkan manusia yang terdidik, beriman, berpengetahuan, berketrampilan, dan memiliki rasa tanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk menghadapi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pendidikan Nasional harus dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik tentang kebijakan Bela Negara. Kebijakan untuk membela negara tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Hak dan kewajiban setiap warga negara sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 2 menjelaskan tentang hak-hak pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya di dasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Disamping itu pembahasan hak mempunyai sikap Bela Negara dan kewajiban warga negara dalam bela negara juga diatur pada UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pada pasal 6 Undang-Undang ini, menyebutkan tentang keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Pembinaan Bela Negara ini merupakan upaya perwujudan dari hak dan kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup sejahtera, adil, aman, damai, dan sejahtera. Total akumulasi kader bela negara hingga tahun 2019 sebanyak 84,5 juta orang yang terdiri dari 94,61 % unsur (Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemda), 4,76 % Kemhan, 0,48 % TNI, dan 0,16 % Polri. Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan telah melaksanakan berbagai sosialisasi tentang Bela Negara menggunakan berbagai macam media. Termasuk pembuatan Komik Bela Negara untuk Taman Kanak-Kanak/TK, (Sumber; Keynote speech Menhan pada Seminar Bela Negara Unhan, Sentul 06 November 2019).

Dalam kerangka Pendidikan Nasional, pembentukan siswa

mempunyai sikap Bela Negara di atur dalam Permendikbud No 39 Tahun 2008 pasal 31 ayat 1 tentang pembinaan kesiswaan dalam pembentukan siswa menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan telah menyusun Kurikulum Bela Negara yang disahkan sejak tanggal 3 Mei 2016. Kurikulum tersebut salah satunya dibuat untuk siswa tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Materi yang diajarkan antara lain adalah bidang studi dasar berupa pengetahuan tentang ke-Indonesia-an. Materi ini berisi pengenalan lambang Negara, keberagaman suku, agama hingga mengenal peta wilayah. Selanjutnya bagaimana dengan penanaman nilai-nilai bela negara pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ?. Pendidikan pada anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (Direktorat PAUD, 2005).

Saat ini banyak sekali tempat yang melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan menggunakan berbagai metode serta kurikulum dan pada umumnya dipengaruhi oleh yayasan pendidikan yang membawahinya. Misalnya saja yang menggunakan metode pendidikan berdasarkan agama tertentu, atau menurut metode umum yang telah berkembang

seperti metode Montesory, walaupun tentunya ada muatan dalam kurikulum yang harus mengikuti ketentuan dari Ditjen PAUD Kemendikbud.

Pendidikan anak usia dini dianggap sebagai cermin dari suatu tatanan masyarakat. Akan tetapi juga ada pandangan yang mengemukakan bahwa sikap dan perilaku suatu masyarakat dipandang sebagai suatu keberhasilan ataupun sebagai suatu kegagalan dalam pendidikan. Sementara itu keberhasilan pendidikan tergantung kepada pendidikan anak pada usia dini, karena jika pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini baik, maka proses pendidikan pada usia remaja dan usia dewasa akan naik pula. Dengan beragamnya model pendidikan PAUD saat ini, maka masalahnya adalah bagaimana nilai-nilai bela negara itu diimplementasikan dalam pembentukan karakter di PAUD.

Upaya Pemerintah Menerapkan Nilai-Nilai Bela Negara Pada Pembentukan Karakter di PAUD.

Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait telah melakukan upaya untuk penerapan nilai-nilai Bela Negara pada pembentukan karakter di PAUD. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kemendikbud, dan Ditjen Pothan Kemhan. Kemendikbud melalui Ditjen PAUD dan Dikmas telah menyusun visi, misi serta strategi pembinaan PAUD sampai dengan tahun 2045.

Dari hasil penelitian, diperoleh data studi kepustakaan berupa buku kurikulum PAUD (apa, mengapa, dan bagaimana), pendidikan anak usia dini yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28. Selanjutnya Kemendikbud telah memiliki arah pembangunan PAUD 2011-2045 yang dibagi dalam 5 tahap yakni : 2002-2011 tahap perluasan layanan, 2011-2015 tahap pemantapan mutu, 2015-2025 tahap standarisasi mutu nasional, 2025-2035 tahap standar mutu internasional, 2035-2045 tahap layanan paripurna.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud pada tahun 2015

menerbitkan Buku Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PAUD. Buku pedoman tersebut terdiri dari 10 buku pedoman; 1.Pedoman Penilaian Pembelajaran PAUD, 2.Pedoman Pengelolaan Kelas PAUD, 3.Pedoman Penanaman Sikap PAUD, 4.Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PAUD, 5.Pedoman Pengembangan Tema Pembelajaran PAUD, 6.Pedoman Pengelolaan Pembelajaran PAUD, 7.Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD, 8.Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum 2013 PAUD, 9.Kurikulum PAUD. Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, 10.Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan PAUD.

Selain itu dalam Kurikulum 2013 PAUD yang dibuat pula oleh Direktorat Pembinaan PAUD, dijelaskan tentang pentingnya penanaman sikap. Penanaman sikap ini berhubungan erat dengan pembentukan karakter. Dengan mencermati perkembangan ilmu dan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat cepat, sehingga mengakibatkan persaingan sumber daya manusia menjadi demikian tajam. Hal ini menuntut pelaksanaan pendidikan dimasa depan tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi pengembangan karakter yang kuat, gigih, dan kreatif menjadi jauh lebih penting dalam pendidikan. Kemendikbud dalam hal ini sudah menetapkan dengan sangat jelas bahwa pendidikan disetiap jenjang mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan komposisi yang berbeda. Semakin awal jenjang pendidikan tersebut semakin besar komposisi pengembangan kompetensi sikap. Sebagai jenjang yang paling dasar, maka PAUD diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membentuk sikap dan karakter peserta didik.

Inilah yang diimplementasikan pada Kurikulum 2013 PAUD, membangun karakter anak dilakukan dengan penanaman sikap melalui pengembangan kompetensi sikap, yang bukan hanya sebagai dampak ikutan (nurturan) dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini melainkan komponen yang harus direncanakan secara lebih matang dan mendalam yang dilaksanakan secara terus menerus sehingga membentuk kebiasaan lebih lanjut menjadi perilaku yang akhirnya menjadi sikap dan karakter baik.



Sumber foto : Penuis

Pengembangan kompetensi sikap memerlukan proses yang panjang dan konsisten, namun dalam pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan cara belajar anak usia dini yang dilaksanakan melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Yang terpenting dalam pembelajaran ini adalah keteladanan dari tim guru yang tentunya menjadi model bagi peserta didik. Dalam kurikulum PAUD 2013 kompetensi inti sikap yang harus dikembangkan terdiri dari :

- Kompetensi Inti 1 Sikap Spiritual. "Menerima ajaran agama yang dianutnya". Mencerminkan kecerdasan spiritual sebagai sikap kesadaran mengenal agama yang dianutnya.
- Kompetensi Inti 2 Sikap Sosial. "Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan/ atau pengasuh, dan teman, "Mencerminkan kecerdasan sosial-emosional sebagai sikap dan perilaku yang menjadi perasaan diri, orang lain, dan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma serta budaya yang berlaku. Kompetensi inti

tercapai diakhir program PAUD setelah anak selesai mengikuti layanan PAUD. Selanjutnya Kompetensi Inti dikembangkan menjadi Kompetensi Dasar meliputi:

- 1). Kompetensi Dasar 1 Sikap Spiritual.
 - a. Mempercayai adanya Tuhan melalui Ciptaan-Nya.
 - b. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
- 2). Kompetensi Dasar 2 Sikap Sosial.
 - a. Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat.
 - b. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu.
 - c. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif.
 - d. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis.
 - e. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri.
 - f. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan.

g). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar (mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan.

h). Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian.

i). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuan.

j). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain.

k). Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri.

l). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab.

m). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur.

n). Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik dan teman.

Didalam buku kurikulum PAUD dijelaskan tentang cakupan rentang usia sasaran anak usia dini di Indonesia dari 0-6 tahun, program layanan anak usia dini di Indonesia terdiri atas Taman Kanak-Kanak untuk anak usia 4-6 tahun, Kelompok Bermain prioritas untuk anak usia 2-4 tahun, Taman Penitipan Anak prioritas usia 0-6 tahun, dan Satuan PAUD Sejenis (anak 0-6 tahun). Taman Kanak-Kanak masuk dalam jalur pendidikan formal, sedangkan yang lainnya masuk dalam jalur pendidikan non formal. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD Kemendikbud sudah mencakup bagaimana Implementasi dari pembentukan karakter di PAUD, tetapi belum secara spesifik menjelaskan tentang konten nilai-nilai Bela Negara, walaupun



Sumber foto : saiful Mahasiswa PKL

isi konten dari buku pedoman menyadari diri sebagai mahluk serta buku kurikulum PAUD sudah mencakup esensi dari nilai-nilai bela negara.

e. Pengenalan ketaatan, kepatuhan dan menghormati orang tua serta guru melalui cerita keteladanan.

Penjelasan tentang pentingnya nilai-nilai bela negara untuk diimplementasikan kedalam pembentukan karakter di PAUD masih perlu ditegaskan lagi agar

Dijelaskan pula bahwa tujuan ada pemahaman yang sama dari tersebut secara implisit sudah para pengelola PAUD termasuk terakomodasi dalam Standar stake holder tentang nilai-nilai bela negara seperti apa dan bagaimana Dasar (KD) mata pelajaran yang implementasinya di PAUD relevan (misalnya Pendidikan Tentunya Sinergitas dengan para Kewarganegaraan/PKN) namun pemangku kepentingan termasuk secara eksplisit perlu dinyatakan Kementerian/Lembaga terkait dalam indikator mata pelajaran, seperti Kementerian Pertahanan Didalam petunjuk pelaksanaan harus lebih ditingkatkan sehingga nomor 03/X/2013 juga dijelaskan produk buku pedoman serta aturan tentang ruang lingkup Pembinaan menjadi kesatuan yang utuh Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam hal implementasi nilai-nilai ditingkat TK, yaitu PKBN dapat dilaksanakan melalui integrasi dalam mata pelajaran yang relevan, muatan lokal, dan/ atau pengembangan diri secara berkelanjutan.

Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) pada tahun 2011 telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/03/X/2011 tentang Panduan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sasaran yang menyangkut ranah untuk Taman Kanak-Kanak (TK) kognitif, afektif, psikomotorik melalui - Sekolah Dasar (SD), dan pada berbagai macam pembinaan tahun 2015 diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/06/VIII/2015 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara TK adalah :

Tujuan pembinaan kesadaran bela negara seperti dijelaskan didalam petunjuk pelaksanaan nomor 03/X/2011, adalah menunjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam memahami dan menyadari hak dan kewajiban bela negara secara demokratis, melalui upaya pembinaan untuk menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai bela negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tingkat TK/SD adalah untuk membentuk kepribadian siswa yang bertaqwa, memiliki disiplin, dapat mengaplikasikan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,

2. Pembinaan Kerohanian.

a. Pengenalan keyakinan agama melalui cerita kebesaran Tuhan Yang Maha Esa serta praktik sederhana tentang ajaran agama yang dianutnya.

b. Pengenalan moral budi pekerti melalui cerita dan gambar, tentang keagamaan dan keaneka-ragaman budaya bangsa.

3. Pembinaan Kepribadian.

a. Pengenalan perilaku baik dan buruk melalui cerita, lagu, serta sosio drama.

b. Pengenalan tradisi dan peninggalan sejarah yang memiliki nilai-nilai luhur perjuangan bangsa diwilayah sekitar.

c. Pengenalan bahasa yang baik dan benar.

4. Pembinaan Pengetahuan.

a. Pengenalan terhadap lambang-lambang negara.

b. Pengenalan lagu-lagu nasional dan daerah.

c. Pengenalan alat musik dan tarian tradisional.

d. Pengenalan lalu lintas melalui cerita bergambar, bernyanyi, wisata dan bermain di taman lalu lintas.

e. Pengenalan letak tempat tinggal, sekolah dan lingkungan sekitar.

f. Pengenalan berbagai jenis Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

g. Pembiasaan menceritakan

kisah kepahlawanan dari orang tua, guru dan media lain.

5. Pembinaan jasmani.

- Pengenalan olah raga melalui Senam Pagi Indonesia (SPI), Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan senam lainnya yang memiliki nilai PKBN (misal senam kreasi diiringi lagu daerah dan nasional).
- Pengenalan gerak tari tradisional sederhana.
- Pengenalan berbagai keterampilan melalui bentuk permainan.

Esensi dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Ditjen Pothan Kemhan pada intinya sama dengan yang dibuat oleh Kemendikbud jika dilihat dari pembentukan karakter di PAUD, tetapi petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Kemhan lebih implementatif menyangkut semua nilai-nilai bela negara yang bisa ditanamkan pada murid di PAUD. Upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemhan tentang implementasi penanaman nilai-nilai bela negara pada pembentukan karakter di PAUD dapat dilihat melalui matriks dibawah ini.

Matriks Upaya Implementasi Penanaman Nilai - Nilai Bela Negara Pada Pembentukan Karakter di PAUD.

No.	Materi	Kemhan	Kemendikbud
1.	Sosialisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan sosialisasi tentang Bela negara kepada masyarakat secara umum maupun kepada pengelola pendidikan, - Masih dilakukan secara terbatas sehingga dilingkungan pengelola PAUD masih banyak yang belum memperoleh sosialisasi tentang Bela Negara (nilai-nilai Bela Negara yang harus ditanamkan di PAUD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Yang telah disosialisasikan adalah kurikulum PAUD dan buku pedoman penyelenggaraan PAUD (10 Buku Pedoman).
2.	Pembuatan Juklak/ Pedoman.	<ul style="list-style-type: none"> - Juklak / 03 / X / 2011 tentang Panduan Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk Taman Kanak-Kanak (TK)-Sekolah Dasar (SD). - Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/06/VIII/2015 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Guru SD/MI 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PAUD, buku pedoman tersebut terdiri dari 10 buku pedoman: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penilaian Pembelajaran PAUD, 2. Pedoman Pengelolaan Kelas PAUD, 3. Pedoman Penanaman Sikap PAUD, 4. Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PAUD, 5. Pedoman pengembangan Tema Pembelajaran PAUD, 6. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran PAUD, 7. Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD, 8. Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum 2013 PAUD, 9. Kurikulum PAUD. Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, 10. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan PAUD.

3.	Isi Juklak/ Pedoman.	Secara jelas telah menjelaskan terperinci tentang penanaman nilai-nilai bela negara di PAUD	Belum secara spesifik memuat 5 nilai bela negara secara utuh, dan hanya menyebutkan tentang cinta tanah air, serta kesadaran berbangsa.
4.	Perspektif pentingnya penanaman nilai-nilai bela negara	Sangat penting, terlihat dari massivenya program bela negara yang dilakukan Kemhan	Penting, terlihat dari belum massivenya program bela negara yang dilakukan, kemungkinan karena Kemendikbud berpendapat bahwa Kemhan sebagai <i>leading sector</i> untuk program bela negara



Kesimpulan.

Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait telah melakukan upaya untuk penerapan nilai-nilai Bela Negara pada pembentukan karakter di PAUD. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian di Ditjen PAUD Kemendikbud, dan Ditjen Pothan Kemhan. Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD telah menyusun visi, misi serta strategi pembinaan PAUD sampai dengan tahun 2045.

Dari hasil penelitian, diperoleh data studi kepustakaan berupa buku kurikulum PAUD (apa, mengapa, dan bagaimana), pendidikan anak usia dini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28. Selanjutnya Kemendikbud telah memiliki arah pembangunan PAUD 2011-2045. Demikian pula dengan Kemhan, dalam rangka upaya penerapan nilai-nilai Bela Negara di PAUD maka Kemhan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) pada tahun 2011 telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/03/X/2011 tentang Panduan Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk Taman Kanak-Kanak (TK)-Sekolah Dasar (SD), dan pada tahun 2015 diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/06/VIII/2015 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Guru SD/MI.

Dari penelitian baik melalui wawancara maupun observasi dilapangan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai Bela Negara kepada pengelola PAUD maupun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah masih diperlukan. Sehingga, walaupun esensi dari nilai-nilai Bela

Negara sudah nampak didalam kurikulum PAUD tetapi para guru dan pengelola PAUD masih beranggapan bahwa hal tersebut bagian dari proses belajar mengajar di PAUD yang bertujuan untuk mengembangkan aspek pengembangan kognitif, motorik dan lainnya, dan bukan dari kesadaran tentang pentingnya penanaman nilai-nilai bela negara sejak dulu pada anak usia dini.

Oleh karena itu, masih diperlukan langkah komprehensif baik melalui sosialisasi langsung melalui tatap muka maupun melalui media sosial yang saat ini banyak bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pentingnya penanaman nilai-nilai bela negara di PAUD. Kementerian Pertahanan dapat secara langsung melibatkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Angkatan Darat untuk membantu mensosialisasikan tentang Bela Negara, terutama penanaman nilai-nilai Bela Negara di PAUD dengan berkoordinasi pada pengelola PAUD didaerahnya.

Untuk mensiasati keterbatasan dana, maka materi berupa petunjuk pelaksanaan maupun pedoman sosialisasi dapat diakses oleh para Babinsa secara Online dan dapat dibagikan kepada pengelola PAUD secara online pula. Kemhan juga dapat berkoordinasi dengan POLRI untuk membantu melalui Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Karena banyaknya PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia, maka sosialisasi ini harus dilaksanakan secara massive dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama melalui Dinas Pendidikan di daerah.***

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
_____. UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional
_____. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
----- UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN

Buku

- Anita. (2011). Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyono, K. (2007). Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metotologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carol, Seefeldt & Wasik, B.A. (2008). Early Education: Three-, Four-, and Five- year-olds Go to School (Pius Nasar, Terjemahan). New Jersey: Pearson Education.
- Ghony, M.D dan Almanshur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maxwell, Alex, J. (2013). Qualitative Research Design: An Interractive Appoach. Amerika Serikat: Sage.
- Moeslichatoen. (1999). Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Putra, N. (2012). Penelitian Kualitatif: Proses Aplikasi. Jakarta: Indeks.
- Rohman, A. (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rusdinal & Elizer. (2005). Pengelolaan Kelas di TK. Jakarta: Depdiknas.
- Siswoyo, D. (2011). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Dirjen Pendidikan Islam Depatemen Agama RI,UUSPN Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tahun 2006.
- Muhammad Fadlillah, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jogjakarta:Ar- Ruzz Media, 2013).
- Muhammad Fadlillah, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jogjakarta:Ar- Ruzz Media, 2013),16.
- Hartono, Pengertian Pendidikan, <http://fatamorghana.wordpress.com>, diakses pada 20 Mei 2014.
- Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter, (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Kailan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendekatan Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005).
- Sugianto, S. (2004: 146). Metode Pengajaran Anak Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Rajawali Pers.

- Subagyo dkk, (2004: 41). Pendidikan Bela Negara. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudiyono. (2007). Buku Ajar dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, S.(2008). Wawasan Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sunarso dkk. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafaruddin. (2008). Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta; Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2012). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan sebagai Ke bijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, H. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahab, S.A. (1997). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2013). Dasar-Dasar Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana.
- Yuliani. (2009). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Permata Puri Media.
- Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Pustaka Pelajar, 2006
- Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group, 2014
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Internet

Hartono, Pengertian Pendidikan, <http://fatamorghana.wordpress.com>, diakses pada 20 Mei 2014.

Koran/Majalah

- Tempo, (10-16 April 2017). "Driskriminasi rasial".
- Kompas, (11 Januari 2017), Tebarkan kebencian tumpulkan pikiran.
- Kompas, (16 Januari 2017), Menenun Semangat Kebangsaan (Fathorrahman Ghufron).
- Kompas, (16 Januari 2017), Bangkitnya Kekerasan Pembelajaran (Saifur Rohman).
- Kompas, (02 Februari 2017), Radikalisme, Pengajaran bisa sentuh anak usia dini.
- Kompas, (06 Maret 2017), Mem manusiakan Manusia.

Energi Listrik Infrastruktur Kritis dan Keamanan Nasional

Oleh :

Darma Agung S. Irfiansyah
(Alumnus Universitas Pertahanan)



Foto: "Indonesia di Malam Hari" Sumber: NASA Earth Observatory, 2016.

Pemadaman listrik (listrik) dalam durasi waktu yang lama, gangguan / kegagalan infrastruktur tentu bukan peristiwa baru di sehingga mengganggu aktivitas listrik. Indonesia. Setiap daerah pasti publik, perekonomian nasional dan pernah mengalami hal yang sama, pemerintahan.

setidaknya kejadian pemadaman bergilir. Bahkan saat ini, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami pemadaman, karena kurangnya pasokan listrik.

Indonesia telah mengalami sejumlah pemadaman massal

seperti pada tahun 1997, 2002, 2005, dan yang terakhir menjadi umumnya dilihat dari perspektif perhatian luas adalah pemadaman listrik yang terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Agustus 2019 lalu.

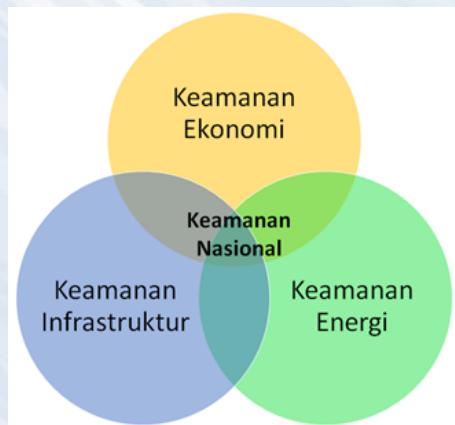
Kejadian ini sotak menjadi perbincangan publik dan ulasan pada media asing, karena kasus ini terjadi pada ibukota Indonesia untuk

Tidak heran bila Presiden Joko Widodo kemudian menuntut PLN susun, terdiri dari beberapa faktor/ untuk melakukan investigasi dan aspek keamanan yang saling perencanaan yang matang agar terkait, yaitu antara infrastruktur, kejadian serupa tidak terulang di ekonomi, dan energi. Infrastruktur

Dalam konteks infrastruktur kritis nasional, kerangka berpikir kritis nasional terkait dengan atau merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional. Aset negara nasional yang terdiri dari infrastruktur kritis dan objek vital nasional, adalah aset vital, sehingga pandangan dari perspektif ancaman terhadap infrastruktur "keamanan ekonomi". Argumennya kritis (terutama infrastruktur

Kejadian ini sotak menjadi perbincangan publik dan ulasan pada media asing, karena kasus ini terjadi pada ibukota Indonesia untuk

nasional, sosial, politik, dan stabilitas keamanan.



Pemikiran ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, beberapa infrastruktur kritis dikendalikan dan dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN seperti PLN.

Pemadaman listrik massal adalah masalah keamanan ekonomi yang terkait dengan dan/atau dapat mempengaruhi keamanan nasional. Ancaman terhadap keberlanjutan dan kontinuitas produksi/pasokan energi, perlindungan infrastruktur kritis nasional dan sumber-sumber produksi ekonomi nasional, menjadi bagian penting dan harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan di sektor pertahanan dan keamanan nasional.

Keamanan Ekonomi

Keamanan nasional mengalami perluasan makna. Perkembangan konsep keamanan yang diasosiasikan dengan ancaman yang bersumber dari kekuatan militer negara lain, berkembang pada ancaman-ancaman non-militer/non-tradisional, yang esensinya dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara.

Michael Morell (2016) mengatakan bahwa "kesehatan ekonomi suatu negara adalah penentu terpenting dalam kemampuannya melindungi dirinya sendiri, penentu

terpenting dalam kemampuannya yang luas. Ada berbagai pendekatan memproyeksikan kekuatan, penentu dalam konsep "Keamanan Ekonomi", terpenting dalam keamanan nasionalnya".

Menurut Ronis (2011) keamanan nasional adalah (terdiri dari) kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Keamanan ekonomi adalah elemen utama dari keamanan nasional. Tidak peduli bagaimana kita melihat keamanan nasional, tidak ada pertanyaan tentang perlunya memasukkan kelangsungan perekonomian negara kita². Tanpa Cornell (2009) menyebutkan modal, tidak ada bisnis; tanpa bisnis, ada tiga level keamanan nasional tidak ada untung; tanpa laba, tidak ada yang berkaitan dengan energi, ada pekerjaan. Dan tanpa pekerjaan, dan tingkat ketiga adalah menjaga tidak ada pajak, dan tidak ada vitalitas ekonomi. Dengan demikian, perlindungan infrastruktur energi dapat dilihat dalam perspektif

keamanan ekonomi untuk melindungi vitalitas ekonomi nasional³.

Keamanan ekonomi merupakan konsep kompleks, yang, pada dasarnya, mengacu pada



Sumber: Phillip E. Cornell, "Energy and the Three Levels of National Security: Differentiating Energy Concerns within a National Security Context", Connections, Vol. 8, No. 4 (Fall 2009)

kemampuan negara, masyarakat, Gangguan pasokan listrik yang untuk memastikan sumber daya disengaja akan memengaruhi material, yang dibutuhkan oleh keamanan nasional, ekonomi, dan dimensi lain keamanan nasional kehidupan setiap orang. Karena secara tepat waktu, secara kursif, jaringan listrik dan sumbernya yang berlimpah, dan efektif untuk tersebar luas, ini menjadi tantangan mencapai tingkat tertinggi dari bagi efektivitas organisasi dan perlindungan operasional mereka. struktur pertahanan⁶. (Amin, 2002) Keamanan ekonomi memastikan

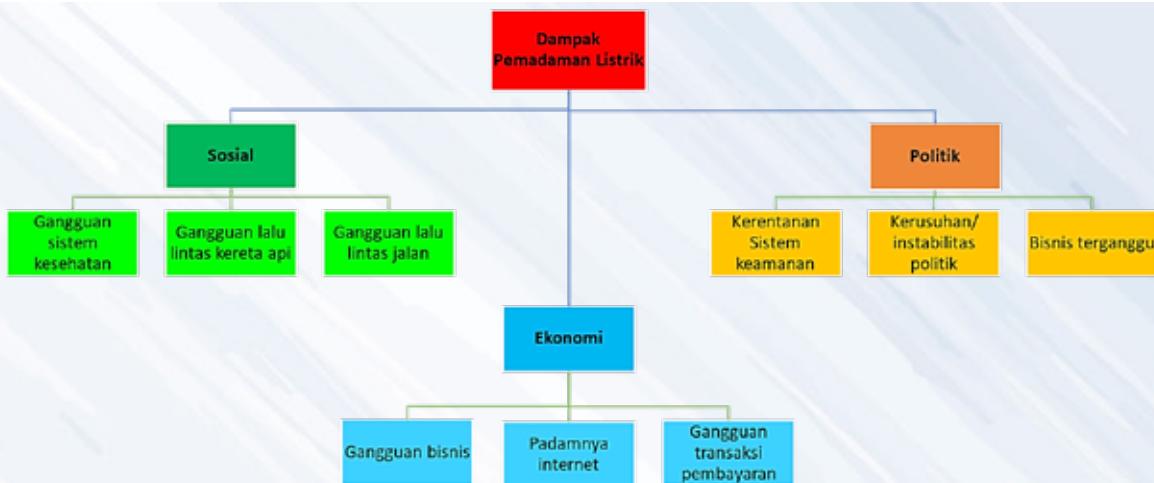
tidak hanya pengamanan sumber daya untuk negara dan vitalitas nasional, tetapi juga potensi pengembangan, dalam keadaan pengasingan untuk kedaulatan dan kemerdekaan⁴. (Rotaru, 2009)

Bukan tugas yang mudah untuk mendefinisikan keamanan ekonomi karena perspektif konsep ekonomi

menentu terpenting dalam kemampuannya yang luas. Ada berbagai pendekatan memproyeksikan kekuatan, penentu dalam konsep "Keamanan Ekonomi", terpenting dalam hal ruang lingkup studi (seperti: ekonomi makro, ekonomi mikro, keuangan, perdagangan internasional, dll), berdasarkan pendekatan ideologis (liberalisme, marxisme, dll), berdasarkan subyek ekonomi (negara atau individu), atau berdasarkan studi semiotik tentang definisi "ekonomi" itu sendiri (produksi, distribusi, konsumsi, sumber daya yang langka, dll).

Pemadaman listrik menurut Alhelou et.al(2019) dapat berdampak pada 3 aspek yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari pemadaman listrik yaitu gangguan pada sistem kesehatan, lalu lintas kereta api, dan lalu lintas jalan.

Dampak politik dari pemadaman listrik yaitu kerentanan sistem keamanan, kerusuhan/instabilitas



Sumber: Hassan Haes Alhelou, Mohamad Esmail Hamedani-Golshan, Takawira Cuthbert Njenda, and Pierluigi Siano, *A Survey on Power System Blackout and Cascading Events: Research Motivations and Challenges*, Energies 2019, 12, 682

politik, dan bisnis terganggu. online, e-commerce, transaksi untuk turun dan berjalan ke stasiun Dampak ekonomi dari pemadaman pembayaran online, ATM, dan terdekat. Persimpangan jalan menjadi kacau di banyak tempat, lampu lalu lintas tidak berfungsi, sementara polisi tidak tersedia untuk mengelola arus lalu lintas⁷.

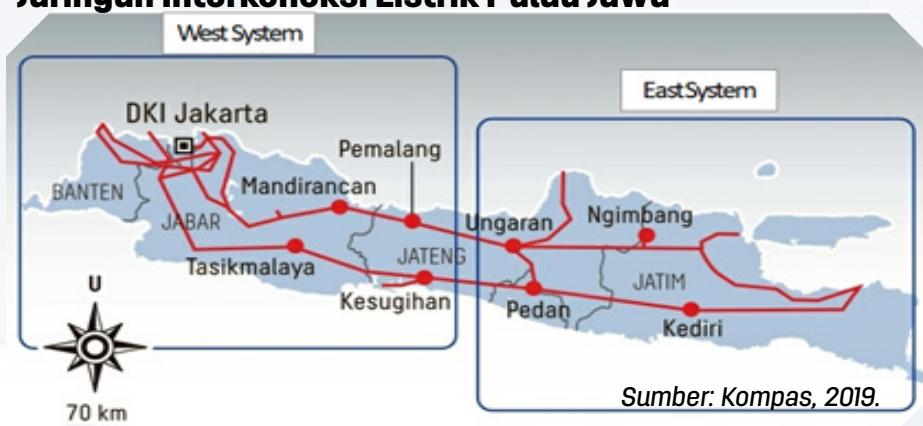
Paganini (2015) mengatakan, karena konsumen tidak dapat "Dampak ekonomi antara lain melakukan reservasi online, atau kerusakan langsung pada aset transaksi pembayaran baik tunai dan infrastruktur, penurunan atau tanpa uang tunai (Ulung, pendapatan penjualan ke 2019)⁹. Sementara Asosiasi perusahaan pemasok listrik, Pengecer Indonesia mengklaim pada hilangnya pendapatan penjualan industri ritel menderita kerugian untuk bisnis dan gangguan pada ekonomi sekitar 200 miliar rupiah (Siregar, 2019)¹⁰. Industri petrokimia rantai pasokan⁸".

Industri hotel serta makanan dan minuman juga terganggu

untuk turun dan berjalan ke stasiun Dampak ekonomi dari pemadaman pembayaran online, ATM, dan terdekat. Persimpangan jalan menjadi kacau di banyak tempat, lampu lalu lintas tidak berfungsi, sementara polisi tidak tersedia untuk mengelola arus lalu lintas¹².

Piter Abdullah Redjalam, Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan pemadaman listrik berdampak hilangnya pendapatan penjualan industri ritel menderita kerugian pulau Jawa adalah pusat gravitasi ekonomi Indonesia. Hampir 60% kegiatan ekonomi ada di pulau ini, dan menyumbang 58,5% dari total PDB nasional¹⁴. (Yudhistira, 2019) Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, kontribusi ekonominya terhadap PDB nasional mencapai sekitar 17-18% dari PDB nasional¹⁵. (Rahardyan, 2019) Ini adalah kontribusi tertinggi di antara kota-kota lain di Indonesia, dan 20% ekonomi Indonesia berasal dari Jakarta dan kota-kota terdekat¹⁶. (Jefriando, 2019)

Jaringan Interkoneksi Listrik Pulau Jawa



Sumber: Kompas, 2019.

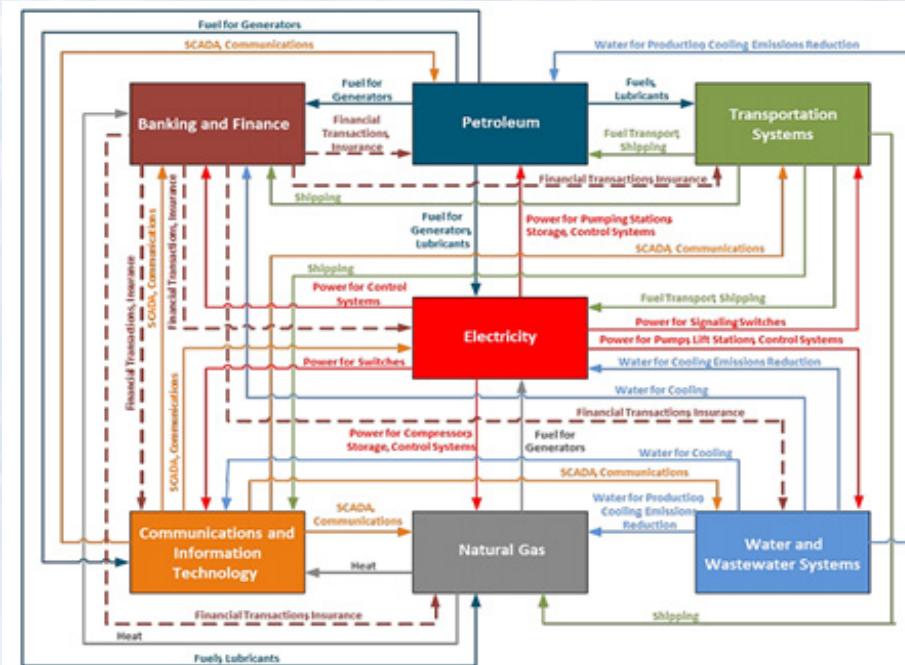
Pada Agustus 2019, juga dilanda pemadaman listrik dan pemadaman listrik melumpuhkan menyebabkan kerugian finansial kota-kota yang terdampak sekitar 375 miliar rupiah (Pratomo, dan menyebabkan gangguan 2019)¹¹. bisnis dan kekacauan sosial.

Matinya jaringan telekomunikasi menyebabkan jaringan internet offline. Bisnis yang bergantung pada telekomunikasi dan layanan kemacetan lalu lintas yang parah, data menjadi terganggu, seperti sementara KRL dan kereta MRT berhenti beroperasi, menyebabkan bisnis platform digital, transportasi terhenti, memaksa penumpang

Menurut Infrastruktur kritis adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menggambarkan aset yang penting untuk berfungsinya masyarakat dan ekonomi¹⁷. (Hokstad et.al, 2012)

Cavelty (2008), kritis biasanya sebagai sistem

Interdependensi Infrastruktur Kritis

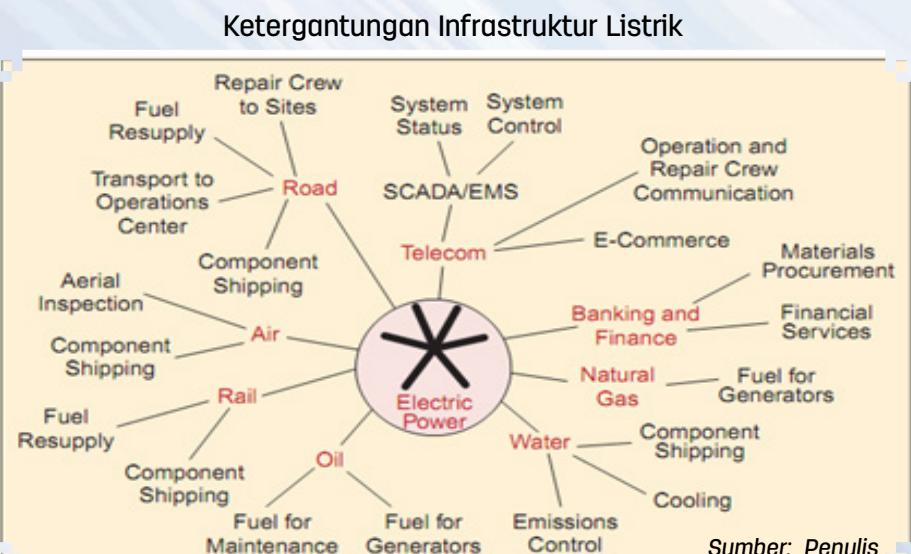


Sumber: Duane Verner, Frederic Petit, and Kibaek Kim, Incorporating Prioritization in Critical Infrastructure Security and Resilience Programs, Homeland Security Affairs, Volume 13 Article 7 (October 2017).

atau aset yang sangat vital bagi suatu negara sehingga setiap ketidakmampuan yang diperluas atau kerusakan sistem semacam itu akan memiliki dampak yang melemahkan pada keamanan, ekonomi, kesehatan atau keselamatan publik nasional, atau kombinasi di atas¹⁸.

Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 tahun 2014, mendefinisikan infrastruktur kritis sebagai Infrastruktur kritis adalah aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, ketabilan perekonomian nasional, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau gabungan diantaranya.

Cavelti (2008) menjelaskan bahwa beberapa infrastruktur dianggap "kritis" (dalam arti 'vital', 'penting', 'esensial') oleh pihak berwenang karena ketidaktersediaan mereka dalam waktu yang lama, dalam semua kemungkinan, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan krisis besar. Saat ini, infrastruktur kritis ini sebagian besar dalam bentuk



sistem yang saling berhubungan, perang, kompleks dan semakin virtual¹⁹.

Interkoneksi berarti infrastruktur kritis memiliki hubungan interdependensi di antara mereka. Itulah alasan apa yang terjadi pada satu infrastruktur dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi infrastruktur lainnya, berdampak pada wilayah geografis yang luas, dan menyebabkan gangguan ke seluruh perekonomian nasional dan global.

Tidak ada penjelasan, setidaknya dalam dokumen legal, mengenai apa saja infrastruktur kritis ini menggarisbawahi nilai kritis dari

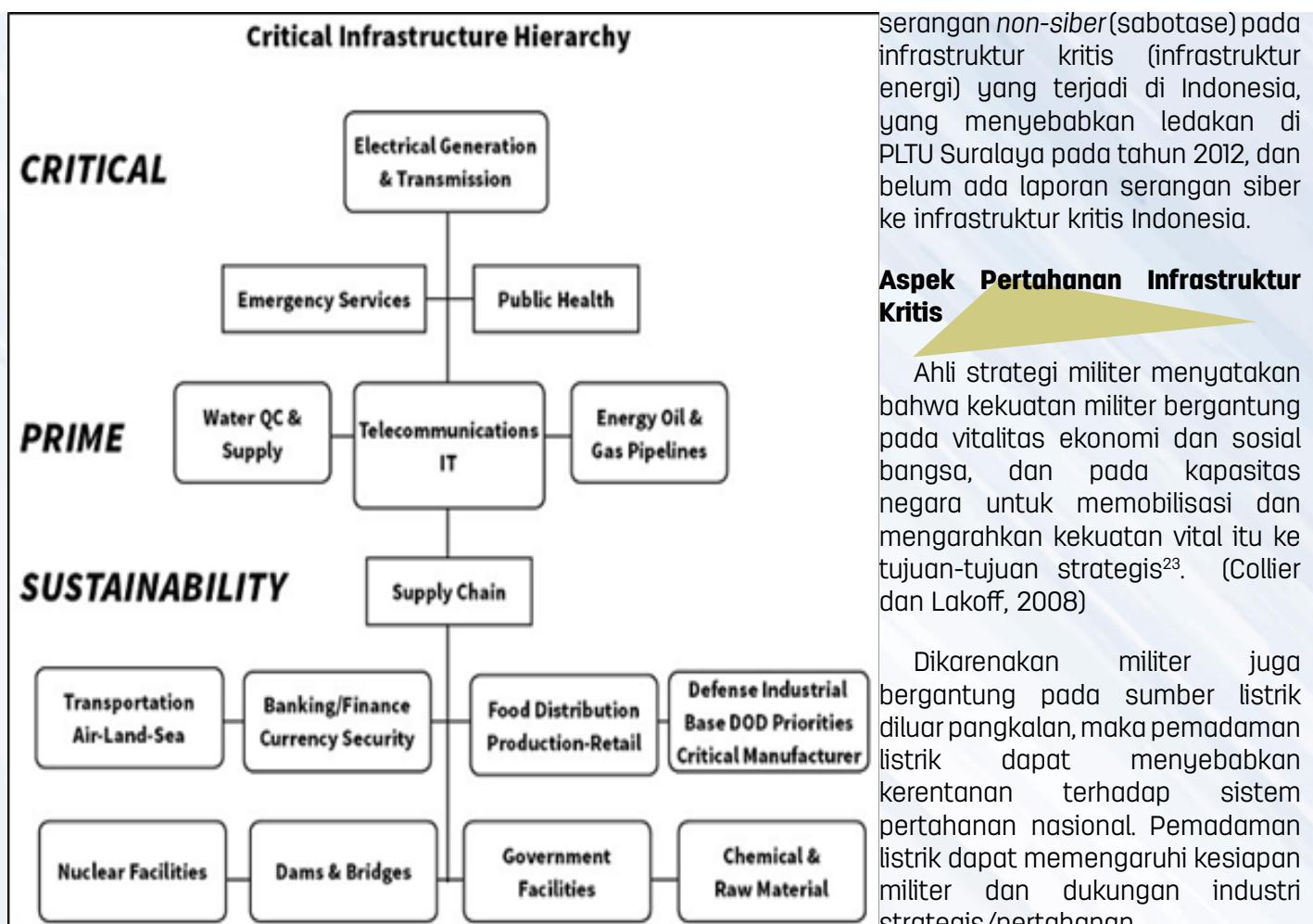
Indonesia. BSSN memiliki versi lain dari infrastruktur kritis yang disebut dengan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) yang terdiri dari 10 sektor, yaitu: Penegakan Hukum; Energi dan Sumber Daya Mineral (termasuk di dalamnya listrik); Transportasi; Keuangan dan Perbankan; Kesehatan; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pertanian; Pertahanan dan Industri Strategis, Layanan Darurat, dan Sumber Daya Air²⁰.

Sistem infrastruktur dapat menjadi subyek ancaman dan bahaya dari berbagai jenis dan kemudian kolaps sebagian atau seluruhnya. Ancaman dan bahayanya dapat berupa bencana alam, cuaca buruk, kegagalan teknis, faktor manusia, konflik tenaga kerja, sabotase, terorisme, dan tindakan

Ketergantungan Infrastruktur Listrik

Pemadaman listrik dapat mempengaruhi semua kegiatan vital dalam masyarakat. Sistem tenaga listrik, seperti kebanyakan sistem kompleks lainnya, sering kali direpresentasikan sebagai jaringan²¹. (Holmgren, 2006)

Adams Jr.(2015) mengkategorikan infrastruktur kritis menjadi 3 kelompok hierarki: kritis, utama, dan berkelanjutan. Hirarki teratas adalah kelompok kritis yang terdiri dari pembangkit listrik dan transmisi, layanan darurat dan kesehatan masyarakat. Ini menggarisbawahi nilai kritis dari



Sumber: John A. Adams, Jr., *Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk*, Friesen Press, 2015, hal. 96.

infrastruktur tertentu²².

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa insiden yang menargetkan infrastruktur kritis seperti:

- Stuxnet untuk program nuklir Iran pada tahun 2009
- Serangan *Black Energy Trojan* terhadap jaringan listrik Ukraina pada 2015.
- Serangan *Industroyer* terhadap jaringan listrik Ukraina pada tahun 2016.
- Menggunakan *Shamoon* untuk menyerang sistem di Aramco, perusahaan minyak nasional Arab Saudi pada 2012.
- Menggunakan serangan *malware* pada jaringan untuk menyerang bank-bank

di Amerika Latin dan Asia mulai 2015 dan seterusnya

- Menyerang sistem keselamatan kritis untuk unit kontrol industri di perusahaan minyak dan gas Saudi pada 2017 menggunakan *Triton*.
- Menyandera layanan Kesehatan Nasional Inggris dengan serangan *Ransomware Wannacry* pada 2017
- *Malware NotPetya* menghantam organisasi energi dan transportasi di Eropa, AS, Rusia, dan Ukraina pada 2017
- Sistem *SCADA* yang ditargetkan, terutama di Ukraina, dengan *malware VPNFilter* pada tahun 2018

Sementara itu, hanya ada satu

serangan *non-siber* (sabotase) pada infrastruktur kritis (infrastruktur energi) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan ledakan di PLTU Suralaya pada tahun 2012, dan belum ada laporan serangan siber ke infrastruktur kritis Indonesia.

Aspek Pertahanan Infrastruktur Kritis

Ahli strategi militer menyatakan bahwa kekuatan militer bergantung pada vitalitas ekonomi dan sosial bangsa, dan pada kapasitas negara untuk memobilisasi dan mengarahkan kekuatan vital itu ke tujuan-tujuan strategis²³. (Collier dan Lakoff, 2008)

Dikarenakan militer juga bergantung pada sumber listrik diluar pangkalan, maka pemadaman listrik dapat menyebabkan kerentanan terhadap sistem pertahanan nasional. Pemadaman listrik dapat memengaruhi kesiapan militer dan dukungan industri strategis/pertahanan.

Sistem kelistrikan dan infrastruktur kritis telah diakui sebagai target pemboman strategis di masa perang. Thomas Griffith Jr. mengemukakan bahwa sistem kelistrikan telah menjadi sasaran favorit kekuatan udara sejak *Air Corps Tactical School (ACTS)* pertama kali mempertimbangkan sistem target ini pada 1930-an. Sejak saat itu, sistem kelistrikan telah ditetapkan sebagai target penting dalam setiap perang, dan kemungkinan akan diajukan untuk diserang dalam kampanye udara di masa depan²⁴.

Para ahli teori ACTS berusaha mengidentifikasi target-target yang vital dalam peperangan, khususnya melalui pengembangan teori 'jejaring industri'. Mereka berpendapat bahwa kelemahan sistem ekonomi modern terletak pada ketergantungan kompleks (*complex interdependencies*). Donald Wilson menulis pada tahun 1938 bahwa ekonomi modern terdiri dari 'elemen yang saling terkait dan

salang bergantung'. Dengan menyerang target-target ini, seseorang dapat dengan cepat - dan secara ekonomis - melumpuhkan upaya perang musuh.

Tenaga listrik dipandang sebagai target kunci yang ditetapkan dalam teori jejaring industri secara keseluruhan. Serangan terhadap tenaga listrik menarik karena beberapa alasan: itu akan mempengaruhi, secara simultan, aspek sosial dan ekonomi suatu negara; target relatif mudah ditemukan dan diyakini rentan terhadap serangan udara; generator dan *transformator* sulit diganti; dan mungkin yang paling penting, jenis serangan ini ekonomis, karena sejumlah kecil kehancuran akan menghasilkan, hasil yang mengesankan.

Sistem tenaga listrik secara umum terdiri dari empat subsistem yang terpisah: pembangkit, transmisi, distribusi, dan kontrol. Metode paling cepat untuk memutus aliran listrik pada fase pembangkitan adalah dengan menyerang bangunan yang mengandung turbin dan generator.

Walaupun hasil dari serangan terhadap sistem energi nasional dapat bervariasi (berhasil atau tidak) tergantung pada sistem kelistrikan nasional milik musuh, dan faktor-faktor lain, namun sistem kelistrikan tetap menjadi *top target* pemboman di masa perang.

Perlindungan Infrastruktur Kritis

Perlindungan infrastruktur kritis adalah konsep yang terkait dengan kesiapan dan respons terhadap insiden serius yang melibatkan infrastruktur kritis suatu wilayah atau suatu negara. Ketidakmampuan atau kerusakan sistem dan aset akan berdampak pada melemahnya keamanan nasional, keamanan ekonomi nasional, kesehatan masyarakat secara nasional dan keselamatan suatu bangsa. Sistem dan jaringan yang membentuk infrastruktur secara nasional biasanya merupakan keseluruhan sistem yang kuat, tetapi gangguan pada satu sistem dapat memiliki konsekuensi berbahaya bagi sektor lain²⁵. (Setiawan, 2011)

Perlindungan setiap komponen kritis adalah penting, namun elemen yang paling penting bagi ekonomi, keamanan, dan keselamatan negara secara keseluruhan adalah jaringan listrik. Listrik adalah sumber kehidupan dunia modern saat ini dan kebutuhan utama bagi semua warga negara. Listrik memperkuat ekonomi, kenyamanan konsumen, keamanan

nasional, telekomunikasi kritis, dan kemampuan produksi/rantai pasokan industri untuk memberikan keunggulan kompetitif ke pasar global²⁶. (Adams Jr, 2015)

Ada dua pendekatan dalam Perlindungan Infrastruktur Kritis: pendekatan siber, dan pendekatan non-siber. Akhir-akhir ini, sebagian besar referensi mengenai Perlindungan Infrastruktur Kritis menekankan pada pertahanan/keamanan siber. Namun demikian, ancaman terhadap infrastruktur kritis tidak semata-mata didasarkan pada serangan siber semata, namun juga bervariasi dari sumber daya alam, serangan infrastruktur fisik, sabotase, ancaman orang dalam, dll.

Dari perspektif hukum, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang secara tidak langsung terkait dengan infrastruktur kritis nasional walaupun tidak secara khusus membahas perlindungan infrastruktur kritis, seperti:

- Keputusan Presiden 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
- UU 17/2011 tentang Intelijen Negara
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 82/2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber
- Peraturan Menteri Perindustrian 18/2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Obyek Vital Nasional Bidang Industri
- Peraturan Menteri ESDM 48/2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- UU 5/2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, beberapa pasal di KUHP juga mencakup mengenai perlindungan infrastruktur (tanpa menyebut istilah infrastruktur kritis), seperti pada pasal 406 – 408.

Pemerintah juga sedang menyelesaikan rancangan Perpres terkait Obyek Vital Nasional Strategis yang katanya akan berbeda dengan peraturan terkait Obyek Vital Nasional, termasuk penggunaan kekuatan militer dalam merespon ancaman.

Namun demikian, beberapa peraturan terkesan membingungkan karena ada definisi yang tumpang tindih antara: Infrastruktur Kritis, Obyek Vital Nasional, Obyek Vital Strategis dan Obyek Vital Infrastruktur Kritis Nasional.

Pasca kejadian pemadaman listrik, PLN telah menandatangani sejumlah MoU dengan TNI untuk mengatasi isu pertahanan keamanan yang berkaitan dengan infrastruktur listrik. MoU ini memunculkan pertanyaan terkait dengan isu hukum dan hubungan sipil – militer. Merujuk

pada Keppres 63/2014, pelibatan TNI seharusnya berdasarkan permintaan dari Polri.

Sambhi (2018) menyebutkan bahwa militer Indonesia memainkan peran penting dalam mengamankan pasokan energi dan infrastruktur negara. Kebijakan keamanan energi juga berdampak pada militer, sesuai kebutuhannya akan pasokan bahan bakar dan listrik yang konstan, terutama mengingat semakin meningkatnya ketergantungan pada sistem jejaring elektronik dan rencana akuisisi kekuatan udara dan laut yang lebih modern²⁷.

Di sisi lain, Li et.al (2005) mengatakan di antara ancaman terhadap infrastruktur listrik, sabotase mungkin lebih sulit untuk ditangani karena sifatnya yang rahasia dan tidak bersahabat. Sabotase dapat menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas jaringan listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau fasilitas transmisi utama. Sabotase juga dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem informasi dan komunikasi, dan merusak keandalan pasokan listrik. Jelas sabotase dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan maksimum bagi masyarakat. Berdasarkan ancaman jenis ini, sangat penting untuk mengembangkan rencana dan teknologi pertahanan untuk tenaga listrik dan infrastruktur terkait²⁸.

Sabotase disebutkan dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, sebagai salah satu ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa: agresi, invasi, pemboman, blokade, pelanggaran kedaulatan wilayah, sabotase, jaringan terorisme internasional, dll. Dua ancaman militer terkait infrastruktur kritis adalah berupa sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa, dan bentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Namun penjelasan pasal 7 dalam UU No. 3/2002 membatasi ancaman militer hanya pada ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Tanpa memenuhi persyaratan sesuai definisi, maka pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan militer.

Hal ini cukup dilematis karena pemerintah Indonesia juga telah mencabut peraturan Anti-Subversi (Penetapan Presiden No. 11/1963)

pada tahun 1999 (UU No. 26/1999) karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara. Padahal, undang-undang ini memberikan definisi tindak pidana terhadap negara seperti sabotase, spionase, dll. Masalah ini diusahakan untuk diselesaikan dalam rancangan KUHP yang baru namun ditolak oleh DPR setelah serangkaian demonstrasi mahasiswa.

Berdasarkan peristiwa pemadaman listrik terbaru dan dinamika keamanan kontemporer, mengamankan infrastruktur kritis nasional terutama infrastruktur listrik adalah suatu keharusan karena posisi vital dan kritisnya. Namun demikian, definisi yang jelas tentang infrastruktur kritis dan peraturan operasional juga diperlukan, sehingga pelibatan TNI juga mendapat landasan hukum yang jelas. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini, akan mempengaruhi ekonomi nasional dan keamanan nasional secara keseluruhan.***

REFERENSI

- ¹Michael Morell, The Link Between Economic and National Security, https://www.thecipherbrief.com/column_article/the-link-between-economic-and-national-security, 13 Maret 2018.
- ²Sheila R. Ronis (ed), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, National Defense University, 2011, hal. ix.
- ³Sheila R. Ronis (ed), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, National Defense University, 2011, hal. 17.
- ⁴Marius-Petre Rotaru, "Economic Security - Organic Dimension of National Security," MPRA Paper 17936, University Library of Munich, 2009, hal. 1.
- ⁵Phillip E. Cornell, "Energy and the Three Levels of National Security: Differentiating Energy Concerns within a National Security Context", Connections, Vol. 8, No. 4 (Fall 2009).
- ⁶Massoud Amin, "Security Challenges for the Electricity Infrastructure (Supplement to Computer Magazine)", Computer, Vol. 35 (4): 8, April 2002.
- ⁷Hassan Haes Alhelou, Mohamad Esmail Hamedani-Golshan, Takawira Cuthbert Njenda, dan Pierluigi Siano, A Survey on Power System Blackout and Cascading Events: Research Motivations and Challenges, Energies 2019, 12, 682, hal. 16.

⁸Pierluigi Paganini, Business blackout, economic impact of a cyber attack against a power grid, <https://securityaffairs.co/wordpress/38765/cyber-crime/cyber-attack-power-grid.html>, 22 Juli 2015.

⁹Kurniawan Ulung, Major power outage hit hotels, F&B businesses in Jakarta and surrounds, TTG Asia, <http://www.ttgasia.com/2019/08/07/major-power-outage-hit-hotels-fb-businesses-in-jakarta-and-surrounds/>, 7 Agustus 2019.

¹⁰Efrem Siregar, Duh! Listrik Mati 8 Jam, Ritel Ditaksir Rugi Rp200 Miliar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805162318-4-89945/duh-listrik-mati-8-jam-ritel-ditaksir-rugi-rp200-miliar>, 5 Agustus 2019.

¹¹Harwanto Bimo Pratomo, Akibat Listrik Padam, Industri Petrokimia Rugi Rp375 Miliar, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/akibat-listrik-padam-industri-petrokimia-rugi-rp-375-miliar.html>, 5 Agustus 2019.

¹²Blackout causes citywide disorder, The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/04/blackout-causes-citywide-disorder.html>, 4 Agustus 2019.

¹³Vadhia Lidya, Imbas Listrik Padam Massal, Ekonom: 30% Perekonomian RI Terdampak, Detik.com, <https://finance.detik.com/energi/d-4652470/imbas-listrik-padam-massal-ekonom-30-perekonomian-ri-terdampak>, 5 Agustus 2019.

¹⁴Aria W. Yudhistira (ed), Pusat Ekonomi Nasional Masih di Jawa, KataData, <https://katadata.co.id/grafik/2019/02/13/pusat-ekonomi-nasional-masih-di-jawa>, 13 Februari 2019.

¹⁵Aziz Rahardyan, Anies: Secara Alami, Jakarta Sudah Jadi Ibu Kota Ekonomi Indonesia, Bisnis.com, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190829/384/1142529/anies-secara-alami-jakarta-sudah-jadi-ibu-kota-ekonomi-indonesia>, 29 Agustus 2019.

¹⁶Maikel Jefriando, Ini 10 Daerah dengan Ekonomi Terbesar di RI, Detik.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3496150/ini-10-daerah-dengan-ekonomi-terbesar-di-ri>, 9 Mei 2017.

¹⁷Per Hokstad, Ingrid B. Utne, Jørn Vatn, Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures: A Guideline for Analysis, Springer - Verlag, 2012, hal 19.

¹⁸Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland:

Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 40.

¹⁹Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 1.

²⁰Arif Rahman, Selain Listrik, BSSN Telah Petakan 10 Infrastruktur Kritis, Cyberthreat, <https://cyberthreat.id/read/1929/Selain-Listrik-BSSN-Telah-Petakan-10-Infrastruktur-Kritis>, 5 Agustus 2019.

²¹Ake J. Holmgren, Using Graph Models to Analyze the Vulnerability of Electric Power Networks, Risk Analysis, Vol. 26, No. 4, 2006, hal. 955.

²²John A. Adams, Jr., Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk, Friesen Press, 2015, hal. 96.

²³Stephen J. Collier and Andrew Lakoff, “The vulnerability of vital systems, How ‘critical infrastructure’ became a security problem”, dalam Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 20.

²⁴Thomas E. Griffith, Jr., Strategic Attack of National Electrical Systems, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1994, hal. 1.

²⁵Ahmad Budi Setiawan, “Peningkatan Keamanan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Pada Smart Grid Sebagai Infrastruktur Kritis”, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6, No. 1, 2016, hal. 61.

²⁶John A. Adams, Jr., Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk, Friesen Press, 2015, hal. 95.

²⁷Natalie Sambhi, “Guardian, consumer or middleman? The role of the military in Indonesia’s energy security”, Securing Our Energy, ANU College of Asia & The Pacific, Edition 04, Spring 2018, hal. 45.

²⁸Hao Li, Gary W. Rosenwald, Juhwan Jung, and Chen-Ching Liu, Strategic Power Infrastructure Defense, Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 5, May 2005, hal. 918.

Menhan Hadiri Rapat Perdana Dengan Komisi I DPR RI



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik kehormatan baginya untuk kali 1945 yakni melindungi segenap Indonesia H. Prabowo Subianto pertama dapat duduk berhadapan bangsa Indonesia dan seluruh menghadiri Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi I DPR RI. tumpah darah Indonesia. dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11) bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Lebih lanjut Menhan Dalam kebijakan pembangunan menyampaikan bahwa pada pertahanan negara, Menhan saat ini dirinya secara intensif menghendaki terbangunnya suatu tengah mempelajari kondisi riil sistem pertahanan negara yg

Rapat perdana antara Menhan H. pertahanan keamanan negara terintegrasi, yang juga didukung Prabowo Subianto dengan jajaran dan mempelajari semua program- dengan industri pertahanan yang Komisi I DPR itu dipimpin oleh program yang sudah direncanakan, kuat yang dapat menghasilkan Ketua Komisi I DPRI Meutya Hafid. sedang berjalan ataupun program produk – produk Alutsista yang Rapat diawali dengan perkenalan yang akan dilaksanakan. "Saya dibuat di dalam negeri. para Anggota Komisi I DPR RI dan baru hari ke 19 menjabat Menhan, dilanjutkan membahas Rencana bersama Wamenhan yang baru 17

Sedangkan untuk pembangunan hari menjabat. Tentunya banyak postur pertahanan, Menhan hal yang harus dipelajari dan menginginkan agar kekuatan TNI melakukan inventarisasi masalah", menjadi kekuatan regional yang disegani. "Kita ingin mewujudkan pertahanan negara yang kuat,

"Pada rapat perdana ini kami ingin mendapatkan gambaran kebijakan umum pertahanan negara dari

tutur Menhan. Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan terhadap pelaksanaan tugas – tugasnya menangkal dan mananggulangi tugas – tugasnya sesuai amanah kedepan didasari atas Visi dan berbagai bentuk ancaman", Undang Undang untuk membawa Misi Presiden RI yakni terwujudnya pertahanan yang modern dan kuat", Indonesia Maju yang berdaulat, tutur Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membuka rapat.

Menhan menegaskan, proposisional yang mampu menangkal dan mananggulangi tugas – tugasnya sesuai amanah kedepan didasari atas Visi dan berbagai bentuk ancaman", Undang Undang untuk membawa Misi Presiden RI yakni terwujudnya pertahanan yang modern dan kuat", Indonesia Maju yang berdaulat, tutur Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membuka rapat.

Sementara itu mengawali sambutannya, Menhan menyampaikan bahwa kesempatan rapat perdana bersama Komisi I pertahanan negara bertumpu pada tujuan negara sesuai amanat UUD Pejabat Eselon I Kemhan.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Hadiri ADMM Retreat, Menhan RI Sampaikan Komitmen Indonesia Wujudkan Asia Tenggara Yang Aman, Damai dan Sejahtera

Menteri Pertahanan Republik Indonesia H. Prabowo Subianto bersama Delegasi Kementerian Pertahanan RI menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, Minggu (17/11) di Bangkok, Thailand.

Pada pertemuan yang dihadiri para Menhan se-ASEAN tersebut, Menhan RI menyampaikan keinginannya memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang tangguh, aman, damai dan sejahtera serta disegani oleh kawasan lainnya.

Menurut Menhan RI, ASEAN mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa sehingga sejak dahulu selalu menjadi magnet kepentingan kekuatan global. Selain itu perairan ASEAN juga merupakan urat nadi transportasi dan perdagangan dunia.

Namun, potensi wilayah laut di Asia Tenggara akan sulit dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal

jika tidak ada proteksi serta jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Di tengah situasi dunia internasional yang penuh dengan ketidakpastian, ASEAN harus tetap menjaga komitmen dan konesitasnya bagi kesejahteraan bersama. Guna mewujudkan hal tersebut, ASEAN harus memiliki kerjasama yang tangguh dan dapat diandalkan, tidak mudah dicerai-berai oleh kepentingan sesaat serta perlunya memelihara komitmen terhadap piagam ASEAN.

"ASEAN tidak boleh terpecah belah dan terpolarisasi yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Indonesia secara tegas menentang invasi negara dalam bentuk apapun dan di wilayah negara manapun khususnya di Asia tenggara," tandas Menhan RI.

Keyakinan akan kekuatan ASEAN harus dimulai dengan kemandirian ASEAN khususnya bidang

pertahanan diantaranya meliputi kerjasama pengamanan laut perbatasan, penyelesaian sengketa perbatasan, industri pertahanan dan bidang lainnya harus mengutamakan selalu sentralitas ASEAN.

Kerjasama ASEAN dalam kerangka ADMM-Plus, Kerjasama Mallacca Strait Patrol, Trilateral Indomalphi di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, pertukaran informasi strategis ASEAN Our eyes melalui mekanisme ADI (ASEAN Direct Communication Infrastructure) telah menunjukkan kepada dunia internasional tentang komitmen ASEAN bagi terwujudnya kawasan yang tangguh, aman, damai dan sejahtera.

ASEAN Harus Jadi Penyeimbang di Kawasan Indo – Pasifik

Lebih lanjut Menhan RI menambahkan bahwa ASEAN harus dapat menjadi penyeimbang (balancing) dan penghubung (bridging) di kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Indo-Pasifik Outlook sehingga tidak ada dominasi kekuasaan di kawasan.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Defence Ministers' Meeting Plus “Sustainable Security”

8 November 2019 | Bangkok, Thailand



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

ASEAN melalui netralitas dan sentralitasnya mengajak seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik untuk ikut bertanggungjawab terhadap keamanan kawasan, karena Indo-Pasifik bukanlah semata-mata milik ASEAN melainkan milik masyarakat dunia.

Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka melainkan juga harus memiliki karakteristik inklusif, transparan, dan komprehensif, mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan, dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.

Indonesia berharap agar permasalahan keamanan di kawasan seperti pencurian kekayaan alam, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah, bencana alam dan kemanusiaan dapat diatasi melalui kerjasama yang kuat, sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Permasalahan Laut China Selatan yang mengemuka saat ini harus segera diselesaikan

secara damai melalui forum dialog dan diplomasi dengan mendorong *Code of Conduct* yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh negara Tiongkok.

Pada pertemuan Forum ADMM Retreat tersebut, Menhan RI lebih lanjut berharap akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan kerjasama pertahanan ASEAN di masa yang akan datang.

“Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerjasama yang bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan kita. Melalui pilar politik dan keamanan ASEAN, kita bisa memperkuat keamanan Asia Tenggara yang tentunya juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya”, ungkap Menhan RI***

Wamenhan Memberikan *Keynote Speech* Pada Kegiatan *Goeshmart 2019*

Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono Memberikan Keynote Speech pada kegiatan Goeshmart 2019 : Smart City Week "Transformation Toward Smart X : Smart Village, Smart City, Smart Province and Smart Nation", Selasa (19/11) di Aula Barat ITB Bandung.

Wamenhan dalam Keynote Speech menyampaikan di Tahun 2045 Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar ditingkat Global, dimana jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 10 Miliar jiwa. Di Tahun yang sama diperkirakan 71 persen dari total output dunia dikontribusi oleh negara berkembang dengan Asia menyumbang sebesar 45 persen.

Dalam visi tersebut Indonesia akan keluar dari perangkap pendapatan menengah (*Middle Income Trap*) menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2036. Selanjutnya Indonesia akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi ke-5 terbesar di dunia pada 2045 dengan PDB sebesar USD 7,4 Triliun.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Lebih lanjut Wamenhan kemudahan dan bertujuan untuk menyampaikan pengembangan meningkatkan kesejahteraan *Smart X* harus mempunyai dan masyarakat memahami wawasan keamanan nasional / *national security* sehingga *Smart X* yang dibangun mampu menghilangkan atau meminimalkan adanya ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta siber.

Wamenhan juga menyampaikan bahwa pola pikir masyarakat harus berubah mengikuti tatanan baru sebaliknya tatanan baru tersebut dapat merubah paham /ideologi, mental dan budaya masyarakat. Solusi yang dibangun Tanpa disadari gelombang di dalam *Smart X* disamping perubahan sebagai akibat dari bersifat cerdas juga harus memiliki kemajuan teknologi sudah tidak fitur-fitur yang mampu menjamin bisa dihindari. Berbagai kemajuan keselamatan dan keamanan di bidang teknologi sejatinya masyarakat.*** dimaksudkan untuk memberikan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan RI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Badan Publik yang Cukup Informatif



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Untuk pertama kalinya Ketua Bidang Kelembagaan KIP dan lingkungan sosialnya agar Kementerian Pertahanan RI berharap melalui penganugerahaan mampu bersaing secara global. menerima Anugerah Keterbukaan ini ada inovasi dalam pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 dari informasi publik dari badan publik Komisi Informasi Pusat (KIP). sehingga semakin memudahkan Kategori Anugerah yang diterima pengguna informasi. Kemhan adalah Kementerian sebagai Badan Publik yang Cukup Informatif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KIP Gede Narayana mengatakan bahwa pelaksanaan penganugerahaan ini merupakan Menurutnya era 4.0 sekarang ini, wujud dari pelaksanaan BP wajib memberikan pelayanan terbaik kepada publik untuk Keterbukaan Informasi Publik.***

Penganugerahan yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (20/11), digelar dalam rangka implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Bidang Kelembagaan KIP Cecep Suryadi kepada Kepala Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan Kemhan Kolonel Laut Hadi Prayitno sebagai wakil dari Kemhan RI dengan disaksikan anggota Komisi I M. Farhan dan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Upacara HUT Korpri ke-48, Wamenhan Bacakan Sambutan Presiden RI



Sumber foto: Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan kita pangkas, kecepatan melayani (Wamenhan) Kemhan Sakti Wahyu menjadi kunci reformasi birokrasi. Trenggono menjadi Inspektur Upacara (Irup) dan membacakan Lebih lanjut Wamenhan sambutan Presiden RI pada saat mengingatkan, bahwa kita harus Upacara Bendera HUT Korpri ke-48 Tahun 2019, Jum'at (29/11), di yang sifatnya rutinitas dan lebih Lapangan Apel Bhineka Tunggal Ika meningkatkan produktivitas serta Setjen Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Wamenhan mengurangi kegiatan seremonial mengurangi kegiatan rutinitas dan lebih berorientasi pada hasil. "Tugas birokrasi adalah memastikan

Pada tahun 2019 ini, tema HUT rakyat terlayani dengan baik, serta Korpri ke-48 yaitu "Korpri: Berkarya, program-program pembangunan Melayani dan Menyatukan betul-betul terdelivered, dirasakan Bangsa", Wamenhan mengatakan manfaatnya oleh rakyat, pelayanan bahwa seluruh anggota Korpri yang diberikan harus baik dan untuk mengambil jalan perubahan, diimbangi dengan kemudahan serta melakukan reformasi secara kecepatan", tegas Wamenhan.

berkelanjutan. "Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, Indonesia harus yakin menjadi dan tidak ada lagi kerja rutinitas, negara terkuat di dunia, menjadi birokrasi harus berubah. Kita harus negara pemenang, kuncinya membangun nilai-nilai baru dalam adalah kita mau bersatu, persatuan bekerja cepat beradaptasi dengan dan kesatuan pengikat kita untuk perubahan", ungkapnya.

Indonesia harus yakin menjadi dan tidak ada lagi kerja rutinitas, negara terkuat di dunia, menjadi birokrasi harus berubah. Kita harus negara pemenang, kuncinya membangun nilai-nilai baru dalam adalah kita mau bersatu, persatuan bekerja cepat beradaptasi dengan dan kesatuan pengikat kita untuk menuju Indonesia maju, tanpa persatuan, kemajemukan negara

Seluruh anggota Korpri untuk kita, tidak akan pernah menjadi terus menerus bergerak menjadi energi kolektif untuk mencapai terobosan, terus menerus kemajuan, tanpa persatuan kita melakukan inovasi, pelayanan akan menjadi negara yang lemah yang ruwet berbelit-belit, dan pecundang. yang menyulitkan rakyat, harus

Dalam hal ini Wamenhan mengajak kepada seluruh anggota Korpri yang tersebar diseluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara se-bangsa dan se-tanah air. "Kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara besar, negara dengan 17 ribu pulau, dengan agama, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam, negara yang berbhineka tunggal ika", tegas Wamenhan.

Diakhir sambutannya, Wamenhan mengungkapkan bahwa keberagaman tersebut adalah kekuatan kita, kemajemukan adalah anugerah dari Tuhan YME, kita harus jaga dan rawat bersama-sama. Selamat bertugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat, bangsa dan negara.

Hadir pada upacara tersebut Sekjen Kemhan Laksdyo TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A., serta para pejabat dan staf di Lingkungan Kemhan.***



Sumber foto: Biro Humas Setjen Kemhan

Buka Pameran Produk Indhan Swasta Nasional, Menhan Optimis Kemandirian Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan H. Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membuka pameran produk – produk industri pertahanan swasta dalam negeri yang digelar di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12).

Hadir pula pada pameran tersebut, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Sekjen Kemhan Laksdyo TNI Agus Setiadji, Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan.

Selain pejabat Kemhan dan TNI, hadir meninjau pameran tersebut, Ketua dan beberapa Anggota Komisi I DPR RI, beberapa pejabat Polri serta instansi terkait lainnya. Selain itu, hadir pula para Atase Pertahanan dari negara sahabat.

Usai membuka secara resmi, Menhan berkesempatan berkeliling meninjau secara langsung beragam jenis produk – produk Alpalhankam hasil karya anak bangsa. Pameran tersebut digelar oleh perusahaan industri pertahanan swasta dalam negeri yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Pinhantanas).

Pameran ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan bahwa industri pertahanan dan keamanan dalam negeri (BUMS) memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan Pengguna di bidang Alpalhankam.

Menhan menyampaikan rasa optimisnya dalam lima tahun kedepan industri pertahanan dalam negeri akan lebih mandiri dan mampu memproduksi Alutsista yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menurut Menhan industri pertahanan dalam negeri telah mengalami banyak kemajuan, meskipun masih ada beberapa yang perlu untuk dikembangkan lagi melalui penelitian dan pengembangan.

"Alhamdulillah kemampuan kita sudah sangat baik sangat maju tentunya ada bagian-bagian yang masih kita harus mengadakan penelitian dan pengembangan lagi, tapi insyaAllah lima tahun lagi kita akan lebih lebih mandiri lebih berdiri diatas kaki kita sendiri. Sekarang Saya bangga kita sudah punya kemampuan seperti sekarang", ungkap Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengungkapkan bahwa peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam setiap pengadaan Alutsista untuk kepentingan pertahanan menjadi salah satu tugas yang diberikan kepadanya oleh Presiden RI.

Untuk mendukung tercapainya kemandirian industri pertahanan, Menhan menekankan antara perusahaan industri pertahanan baik dari BUMN maupun BUMS saling bekerjasama dan bersinergi.

Pameran Pinhantanas yang diikuti sebanyak 24 perusahaan Indhan swasta dalam negeri tersebut mengangkat tema "Tekad Industri Pertahanan Dalam Negeri Mendukung Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Indonesia". Sejumlah produk Indhan karya anak bangsa dipamerkan, seperti kapal, pesawat tanpa awak, kendaraan taktis, hingga bom.

Untuk 24 perusahaan tersebut meliputi CV. Indo Pulley Perkasa, PT Elmas Viana Djaja, PT Sari Bahari, PT Merpati Wahana Raya, PT Burangkeng Maju Teknik, PT Prasandha Dumayasa, PT Bhimasena Global Teknologi Industri, PT Bangkit Nata Mandiri

Sejahtera, PT Graha Fatta, PT Shipyard, PT Jala Berkah Nusantara Perkasa, PT Ridho Agung Mitra Abadi.

Selanjutnya, PT Karya Tugas Anda, PT Hariff Daya Tunggal Engineering, PT Komodo Armament Nusantara, PT Samudera Wiwaca Kusuma, PT Batamec, PT Kadomas Aviasindo, CV Maju Mapan, PT Karimun Anugerah Sejati, PT Caputra Mitra Sejati, PT langit Biru Parasut, PT Daya Radar Utama dan PT Bandar Abadi.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

ISSN 1693-0231



INGGRIS

CONTRIBUTION SYAFRUDDIN PRAWIRANEGERA



AND STATE DEFENSE DAY MOMENT

EFFORTS TO IMPROVE STATE DEFENSE AWARENESS
IN THE EDUCATION, COMMUNITY
AND WORK ENVIRONMENT

*Electric Power
Critical Infrastructure
and National Security*

IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE VALUES IN
THE CHARACTER FORMATION
FOR THE EARLY CHILDREN EDUCATION (PAUD)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



kemhanri



Kemhan RI



**SELAMAT
HARI BELA NEGARA**

19 DESEMBER 2019

**PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA
MELALUI
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA**



EDITORIAL

Dear kind readers,

We again greeted WIRA readers through this edition of November-December 2019 Volume VI Number 6.

In this edition the editorial team also presented the article about : Syafruddin Prawiranegara's Contribution and State Defense Day Moment; Efforts to Improve State Defense Awareness in The Education, Community and Work Environment; Implementation of State Defense Values in the Character Formation for the Early Children Education (PAUD); Electric Power, Critical Infrastructure and National Security, and news about The Ministry of Defense.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team



EDITION OF NOVEMBER_DECEMBER 2019

Vol. VI/ No. 6

Published by:
Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
Lieutenant General (Ret)
H. Prabowo Subianto

Secretary General of MoD
Vice Admiral
Agus Setiadji, S.AP, M.A

Editor in Chief:

Head of Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Brig. Gen.
Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor:

Chief of Public Information and
Library of Public Relation Bureau of
The Secretariat General of MoD
Col. Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Baliyanto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.
Fadilah Ferdian

Photo:

Photographers
of Public Relations Bureau
Saifulloh

Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

Contents

ARTICLE

5 /

SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA'S CONTRIBUTION AND STATE DEFENSE DAY MOMENT

Syafruddin's contribution to the continuity of the Republic of Indonesia could not be measured because it was so large that it required the Netherlands to bury his dream of wanting to return to the archipelago. Imagine, if Syafruddin was not moved to form the PDRI when Sukarno-Hatta was captured by the Dutch, this country would automatically be controlled by the colonial state.



9 / EFFORTS TO IMPROVE STATE DEFENSE AWARENESS IN THE EDUCATION, COMMUNITY AND WORK ENVIRONMENT

14 / IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE VALUES IN THE CHARACTER FORMATION FOR THE EARLY CHILDREN EDUCATION (PAUD)

22 / ELECTRIC POWER, CRITICAL INFRASTRUCTURE AND NATIONAL SECURITY

DEFENSE NEWS

30 / MINISTER OF DEFENSE ATTENDS FIRST MEETING WITH INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES COMMISSION I

31 / ATTENDING ADMM RETREAT, RI MINISTER OF DEFENSE CONVEY INDONESIA'S COMMITMENT TO ACHIEVE SAFE, PEACEFUL AND PROSPEROUS SOUTHEAST ASIA

34 / VICE MINISTER OF DEFENSE GIVES KEYNOTE SPEECH AT THE 2019 GOESMART ACTIVITY

35 / REPUBLIC INDONESIA MINISTRY OF DEFENSE WINS AWARD FOR PUBLIC INFORMATION OPENNESS AS A PUBLIC INFORMATIVE BODY

36 / THE 48TH KORPRI ANNIVERSARY CEREMONY, VICE MINISTER READ THE PRESIDENT'S SPEECH

37 / OPENED THE NATIONAL DEFENSE INDUSTRY PRIVATE PRODUCTS EXHIBITION, DEFENSE MINISTER IS OPTIMISTIC ABOUT DEFENSE INDUSTRY INDEPENDENCE

Syafruddin Prawiranegara's Contribution and State Defense Day Moment

By:

Erik Purnama Putra

Republika Journalists and

Graduate Student of Political Communication Program

Paramadina University



foto source: maulanusantara.wordpress.com

Compared to the commemoration of public holidays that comprehend high welfare values, the commemoration of National Defense Day (HBN) is clearly losing its echo. In fact, HBN is a super important event that is worth commemorating on a large scale by this nation every year. The reason is, there is a message-laden content and great enthusiasm from the founding fathers of the nation who did not give up, even though the Netherlands had taken control of the capital of the Republic of Indonesia (RI) at that time in Yogyakarta. However, thanks to the determination and struggle of Syafruddin Prawiranegara and friends (et al), the Indonesian government which had been paralyzed in Yogyakarta, which was marked by the capture of Sukarno-Hatta, could still continue in Bukittinggi, West Sumatra.

On December 19, 1948, Dutch Military Aggression II, which was

supported by military forces with place about 1,900 kilometers (km) complete equipment, destroyed from Yogyakarta, Syafruddin along Yogyakarta. It is the same as the with the Commander of the Army national capital in the grip of the and the Sumatra Territory Colonel invaders. To proclaim its victory, Hidayat, visited the Governor of the Netherlands repeatedly Sumatra / Chairman of the Central broadcast the news over the radio Government Teuku Mohammad stating RI had been defeated. The Hasan at his residence. The three propaganda must be broadcasted figures also held negotiations in to foreign countries to prove that a short time. As a result, they left the Netherlands had returned to Bukittinggi that night to head to the territory of its colony which Halaban, an area of tea plantations had been abandoned since 1942, 15 km south of Payakumbuh. The when it lost to Japan. Automatically decision of the figures turned out with this situation, the newly to be right, because the city of independent nation about three Bukittinggi, which is referred to as years ago was considered to be Indonesia's second capital, was dissolved or disappeared. Moreover, finally attacked by the Dutch. the President and Vice President who are symbols of the Republic of Indonesia's leaders have been taken prisoner and exiled to Bangka Island, so that the fate of this nation is on the edge.

Thanks to good communication, Indonesian leaders in West Sumatra gathered in Halaban. Three days after Yogyakarta was conquered by the Dutch or on December 22, 1948, the three figures together

However, a strategy that had been well designed by the founders of the nation began to run. In a Sitompul, Maryono Danubroto, A



Gambar: Syafruddin Prawiranegara

Karim, Rusli Rahim, and Latif developed the concept of a government. They dare to take the initiative to do that because the state is in a precarious position. Therefore, although Syafruddin et al. Had not yet received the wire sent from President Sukarno, but according to a well-developed concept, the meeting resulted in a decision to form the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI). The task of the PDRI is to replace the temporary Indonesian government formally, so that Sukarno-Hatta can return to the positions of President and Vice President of the Republic of Indonesia.

The outcome of the negotiations between the figures in the interior of West Sumatra decided that Sjafruddin was the Chairperson or President of the PDRI. As for Mohammad Hasan, he was appointed as Deputy Chair of the PDRI. A day later or on December 23, 1948, the man who was born in Serang, Banten, on February 28, 1911, announced the formation of a PDRI complete with a cabinet arrangement. Syafruddin also gave a speech to ignite the spirit of the Indonesian people. With the remnants of his strength and weapons, Syafruddin tried to motivate the army and the community to always be enthusiastic against the oppression carried out by the Dutch as well as to defend Indonesia's independence.

"We prove that the Dutch calculation is completely wrong. The Dutch thought that with the captivity of our highest leaders, other leaders would be discouraged. The Republic of Indonesia is not dependent on Sukarno-Hatta, even though the two leaders are very valuable

"Kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti!"

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda dimana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan lebak senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh!"

to us. Whatever broken will grow back, whatever lost will be replaced! "

We call on the entire Indonesian Armed Forces: Fight, fight the Dutch everywhere and with whatever they can be eradicated. Don't put down weapons, stop shooting if there is no order from the government that we lead. Keep this in mind to avoid enemy deception! "

Suddenly, the speech angered the ranks of the Dutch leaders who had already mastered Yogyakarta. This is understandable because Syafruddin is trying to show

the outside world that the Indonesian government still exists. Moreover, speeches over the radio can be tapped by Dutch radio in Riau and the signal is captured by Singapore radio stations. Since the PDRI declaration replaced the Sukarno-Hatta government, Syafruddin has become the number one figure targeted by the Dutch. His movements continued to be monitored until he had to often disguise himself to avoid the passing of reports of Dutch spies. Going in and out of the forest became Syafruddin's day-to-day struggle to keep Indonesia standing tall.

A few months later or in mid-1949, the Dutch military position was increasingly unfavourable. The international community condemned the Dutch Military Aggression II, which annexed a sovereign nation. After that the Roem-Royen Negotiations were held, which contained military agreements between the two parties to stop their activities. On July 13, 1949, Syafruddin attended a meeting with Sukarno-Hatta and cabinet ministers, until the decision to dissolve the PDRI. Officially, Syafruddin returned the mandate as the number one person in RI to Hatta who served as Vice President automatically became Prime Minister, because his cabinet had not been dissolved.

What message can be taken from that event? It is very clear here that Syafruddin's heroism is continuing the baton of Indonesia's leadership. Without him, it could be that at that time the Dutch would re-colonize the archipelago, which was only the age of an independent maize from Japan. However, in the midst of all its limitations, the founders of the nation could show that the wheels of the Indonesian government were still exist. Thus, the recognition of the sovereignty of other countries towards RI can be maintained as assets to continue diplomacy.

Apart from the controversy surrounding Syafruddin who had been involved in the Revolutionary Government of the

Republic of Indonesia (PRRI), this nation clearly owed it to him. Without Pak Syaf, his nickname, it could be that the Republic of Indonesia did not commemorate Independence Day every August 17 because Military Aggression II launched by the Dutch at that time, had crippled the official government. However, anticipatory steps have been prepared carefully by figures based in West Sumatra. If the Trinity finally becomes a prisoner of the Dutch Colonial forces, there must be someone who continues. Besides General Sudirman, who continued the struggle through guerrilla warfare in the jungle because he was reluctant to surrender against the Dutch military, Pak Syaf's great services cannot be denied.

Another lesson that can be emulated is that when the international diplomacy led by AA Maramis in India could pressure the Netherlands to free Sukarno-Hatta, the PDRI also ended. Pak Syaf willingly and sincerely handed back his authority to Sukarno-Hatta. He who actually de facto deserves to be called as the 2nd President of RI is pleased not to maintain his status as ruler of this country. He realized that, the authority given to him was only temporary. From there, it can be assessed that Mr. Syaf's sincerity and sacrifice cannot be measured because of his role in making Indonesia remain a sovereign state since the declaration of independence on August 17, 1945.

Edy Suandi Hamid in the book "Mr. Sjafruddin Prawiranegara Nation Leader in the Historical Vortex" in 2011, said, when the Dutch considered RI had ended, a PDRI was formed which aimed to maintain the existence of this country. The power vacuum can result in a emptiness which led to a negative impact on the condition of the Indonesian people and its relationship with foreign countries. Therefore, the formation of PDRI is a very appropriate step because it can save the Republic.

Referring to this, Syafruddin's contribution to the continuity of the Republic of Indonesia could not be measured because it was so large that it required the Netherlands to bury his dream of wanting to return to the archipelago. Imagine, if Syafruddin was not moved to form the PDRI when Sukarno-Hatta was captured by the Dutch, this country would automatically be controlled by the colonial state. Considering the importance of this heroic event, the 6th President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) also signed Presidential Decree (Kepres) No. 28/2006 regarding the government's recognition of the role of the PDRI as a historical part that brought the wholeness of the Republic of Indonesia. Based on Presidential Decree No. 28/2006, every December 19th is now celebrated as National Defending Day (HBN).

National Defense Day

The Ministry of Defense (Kemhan) was aware of Syafruddin's great contribution to the establishment of the Republic of Indonesia. Therefore, the Ministry of Defense gave the highest appreciation by tethering the name of Syafruddin Prawiranegara in one of the buildings occupied by the Directorate General of Defense Planning (DG Renhan). This indicates the figure of Syafruddin who was appointed as a National Hero in 2012, it deserves to be respected and his achievements deserve to be remembered.

In addition, the Ministry of Defense also every 19 December always commemorates the HBN to commemorate the moment of the declaration of the formation of the PDRI. Celebrations are often held in various regions involving the local government (Pemda) and some elements of the community. Unfortunately, the author highlights that during the



Photo Source: Public Relations of MoD

HBN celebration seemed less lively and only run by one ministry alone. Supposedly, HBN is commemorated by all ministries and state institutions which are obliged to be involved in it so that the spread is known to the entire community.

Because if only the Ministry of Defense alone celebrates by alternating around the area then it makes only certain people who understand the historical significance of HBN. Even if it is done only ceremonially, it will seem to narrow the meaning of the birth of HBN. For this reason, HBN celebrations and activities must be expanded and involve all state institutions so that more people understand the historical content in them. Because if the celebration seems to be taken care of only by the Ministry of Defense, then gradually people assume that HBN only belongs to certain institutions, so that people cannot care because they do not know.

It is time for President Joko Widodo and Vice President Ma'ruf Amin to get involved in the commemoration HBN so that more elements of society understand the importance of the events of December 19, 1948. Because if this important moment is only celebrated by a handful of civil servants (ASN) and part of The Indonesian National Armed Forces (TNI), especially if it is only be done by the Ministry of Defense officials, more and more people are not aware of the intentions of HBN.

Therefore, all elements of society, especially school students should be invited to participate actively in the celebration of HBN so that the moment is known to a varied audiences. By doing so, the younger generation came to understand how there were great sacrifices that had been fought by the founding fathers for the sake of maintaining RI. In the midst of the diminishing sense of nationalism due to erosion of foreign culture that invaded Indonesia, the younger generation must be introduced and instilled heroic values as exemplified by Syafruddin.

The author should appreciate the latest breakthrough made by the Ministry of Defense in 2019, which has a different approach in attracting young people to get involved in the commemoration of HBN. The steps taken by the Ministry of Defense by holding a vlog and photography contest deserve a thumbs up, since it invites

the public to actively participate in HBN. By making the best videos and photos that represent the country's defense program, the public is invited to participate in thinking about how to effectively introduce the important history of this nation to be known together.

The reason is that the state defense program is not only done physically, it can also contribute great ideas through creative videos or produce photos that give a deep message about someone who is ready to serve and defend his country from any threats. That way also at the same time as a socialization to the public to get involved, or at least to know that the HBN is a historical event that cannot be separated from the journey of the Republic of Indonesia.

Therefore, the different approach offered by the Ministry of Defense in celebrating HBN this year, deserves credit, because inviting each individual to contribute to the best work. ***



Photo Source: Public Relations of MoD

EFFORTS TO IMPROVE STATE DEFENSE AWARENESS IN THE EDUCATION, COMMUNITY AND WORK ENVIRONMENT

By:

Dedi Kuswand, S. Sos., MM

(Defense Analyst of the Defense Infrastructure Secretariat)

State Defense is a concept of Nationalism in maintaining the existence of the state, which is compiled by legislative instruments. This can be interpreted as an effort to play an active role in advancing the nation and state, both through education, character, and social and welfare improvement. State Defense is the determination, attitude and behavior of citizens imbued with a love for the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) based on the Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state. The defense of the Republic of Indonesia is not solely the task of the Indonesian National Armed Forces (TNI), but all citizens are in accordance with their abilities and professions in the life of a nation and state that have the soul of nationalism and patriotism as the most important aspects in the existence and survival of the Republic of Indonesia which has been proclaimed exactly on August 17, 1945.

The form of love for a country becomes a responsibility that should be owned by every citizen as a form of contribution to the region where he lives and lives. This deep meaning can certainly be implemented in various forms, but the spirit that is built is the spirit to always do self-development and community development as a form of love for the State. The spirit of State Defense can naturally be proven in carrying out forms of real work and achievements that can make an inspiration for many people. Pursuing academic achievement with proof of satisfying results is a form of nationalism if accompanied by a spirit of innovation and creativity to develop society.

In the current era of globalization, information disclosure causes an unstoppable flow of information into Indonesia. Various cultures and ideologies ranging from extreme left (Communism) to extreme right (Liberalism) also attracted the attention of our country and began to be studied and understood. One of the negative effects of globalization is the erosion of the spirit of nationalism and love for the State and the waning spirit of defending the State. Meanwhile,

if there are differences of opinion between groups or disagreements with government policy is a natural in a democratic political system. Even though various anarchist acts of ethnic, religion, race conflict and separatism that occur in the name of democracy will give the impression that there is no more spirit of togetherness of a nation, even group interests and personal interests have become the main goal.

One of the strategies in building the nation's deterrence is to revitalize the fostering of the awareness of defending the country to every citizen. The strategy will be realized if there is integration in cross-sectorial implementation to realize the integrity and survival of the Unitary Republic of Indonesia. Therefore, the dissemination of information on the education and training of State Defending was carried out seriously and maximally. It is hoped that the community will be able to understand and implement the values of patriotism, national and state awareness, self-sacrifice and basic state defense skills.

The Elements of State Defense in the Indonesian People

The elements of State Defense within the Indonesian Nation, consist of; First, the love of the homeland. The love of the homeland is a feeling that arises from the heart of a citizen, to serve, maintain, defend, protect his homeland from all threats and disturbances.

Another definition says that the love of the homeland is a sense of pride, a sense of belonging, a sense of respect, a sense of respect and loyalty that is owned by every individual in the country where he lives. These feelings are a reflection of the behavior of individuals to defend, protect and protect their homeland, are willing to sacrifice for the sake of their nation and country, love and preserve the customs or culture in their country and preserve nature and the environment.



Photo Source: writers

Meanwhile, with the current of globalization in the current era, it will have an impact on the social life of the Indonesian people both positively or negatively. Despite the positive effects of globalization, Indonesia has experienced many changes. This is seen especially in aspects of culture that are increasingly fading among modern society today. Besides that, the attitude of patriotism as a sense of love and care for the Indonesian nation and state with all their body and soul has also begun to decline. Many people buy products imported from abroad and can even buy goods from abroad just to buy branded goods. Not to mention when technology has become increasingly modern it will become ironic and distinctive Indonesian culture began to be shifted by foreign cultures.

However the situation as the next generation of our nation must maintain the culture and traditions left by the ancestors, in order to care for the diversity of the Indonesian people. In addition to increasing the love of the Indonesian homeland one of them seeks to increase harmony among fellow citizens, respect each other in the midst of differences, increase tolerance for others, and love the products of Indonesian children.

Second, is a willing to sacrifice. Having a sense of willingness will be carried away by globalization. To be able to deal with the impacts caused as a result of globalization, the participation of citizens in the Pancasila as a view of life and applicable rules of law, participating in maintaining peace, order and the responsibility of all of us as citizens. By not violating the law, participating in implementing the

Being willing to sacrifice is actually an embodiment of an attitude based on sincerity and sincerity in doing something that cannot be measured by value. The attitude of self-sacrifice can also be manifested in an attitude without expecting anything in return, always maintaining the unity and integrity of the nation and prioritizing the nation over personal or group interests.

Third, the belief that Pancasila is as the State ideology. So great is the meaning of Pancasila as an ideology, Pancasila as the basis of the state system for all Indonesian citizens based on the ideals of the nation. In addition, Pancasila also means a state integrative value. The meaning of Pancasila as the ideology of the Indonesian state

is that it is a fundamental state administration principle, which means that Pancasila is a basic law.

In connection with the current globalization, where there are no clear boundaries between every Indonesian nation, the people and Indonesian people must be more able to open themselves. The most important problem faced in this era by Pancasila is regarding the problem of comprehension and practice. The era of openness has begun to take root strongly in the current era of globalization. Therefore national identity as one of the absolute parts that must be held in order not to disappear and be carried away by globalization. To be able to deal with the impacts caused as a result of globalization, the Pancasila as a view of life and the basis of the state must remain a foothold in attitude. Since Pancasila is the basis of the state and national ideology of the Indonesian people, it has an eternal position in the soul of the Indonesian people.

Fourth, have the basic ability of State Defense. Here it means that people have the initial ability to defend the country both psychically and physically in ensuring the survival of the nation and state. As for the indicators of the sense of ownership of the State Defense, among others; always maintain mental and physical health, continue to develop physical and spiritual abilities. The ability of the State Defense itself can be realized by efforts that benefit one person or another person, namely to maintain physical and mental health, discipline, perseverance, and work hard in carrying out their respective professions.

Fifth, is national and state awareness. One of the national and state awareness that can be realized by the community, especially among the younger generation, is by participating in helping disaster victims. As we know that the Territory of Indonesia

is in the area of the Ring of Fire or an area that is very often affected by earthquakes and other natural disasters.

In addition, the realization of national and state awareness can be active to participate in maintaining cleanliness, at least cleanliness in our own living environment. This is done as the impact of modern life, which relies on foreign lifestyles, namely the increasingly widespread use and circulation of the dangers of drugs, especially among the current millennial generation. Therefore, to achieve national and state awareness, efforts to prevent the dangers of drugs, which is a big enemy for the next generation can be optimized. Not to mention the other big impacts of globalization, namely the fight or brawl either by students or certain community groups. The realization of national and state awareness can be formed in an effort to prevent fights or brawls by carrying out peaceful actions through cultural and artistic cultivation in the educational environment to the residential neighborhoods.

Strengthening the elements of State Defense

The foundation of the Pancasila and the Constitutional Foundation of the 1945 Constitution which becomes the basis of the State Defense and its elements for Indonesian citizens were strengthened in the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 1954 concerning the main points of popular resistance. In line with time, the Defending of the State is also regulated in MPR Decree No. VI of 1973, concerning the concept of insight into the archipelago and national security and stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 1982 concerning the Basic Provisions for the Defense and Security of the Republic of Indonesia, amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1988.

Besides that, several other basic military training, voluntary or regulations also state the Defense compulsory service as a TNI soldier of the State, such as MPR Decree and service in accordance with No.VI of 2000 concerning the the profession. UU no. 39 of 1999 Separation of the TNI with the concerning Human Rights, Article POLRI. MPR Decree No VII of 2000 68: Every citizen must participate concerning the Role of the TNI and in efforts to defend the State, POLRI, and Amendments to the in accordance with applicable 1945 Constitution of the State of regulations. the Republic of Indonesia article 30 Paragraphs (1) and (2). The article states, "That every citizen has the right and duty to participate in the country's defense and security efforts carried out through the defense and security system of the people of the universe by the TNI and the Police as the main component, and the people as a supporting force". There is also Article 27 Paragraph (3): "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the country".

Furthermore, the rights and obligations of the Defending the State are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 concerning National Defense, article 9 Paragraph (1): "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the state which is realized in the implementation of national defense"; Paragraph (2): "The participation of citizens in efforts to defend the country, as referred to in paragraph 1, is carried out through: a. Citizenship education, b.

The Role of the Community in the State Defense Within each Community Environment

The Environmental Settlements. The participation of citizens in the form of efforts in State Defense in a community settlement environment can be held in various ways that are based on awareness of the rights and obligations of each citizen. State Defense Awareness can be continuously developed in the form of a sense of pride as an Indonesian nation, so that there is a concern to protect the land and backyard as well as the entire territory of Indonesia.

Besides that, the other forms are maintaining the good name of the nation and state of Indonesia, contributing and advancing to the nation and state of Indonesia, loving the domestic products, culture, and arts of Indonesia, and awareness of the nation and state. Namely, being aware as the color of the Indonesian nation in the form of behavior, attitudes, and personal life



Photo Source: wartakita.id

in order to socialize in accordance with the nation's personality.

Meanwhile, the ups and downs indicators of the elements of national and state awareness can be measured by the facts that show how the vulnerability of young people from the influence of teachings spread by radical groups both directly and through online media has become very popular lately. That is why awareness in an effort to fortify oneself and the environment, distancing of the state defense and avoiding and rejecting misunderstandings from the influence of teachings and calls for violence becomes a joint task for all levels of society.

Today, with the same passion, which is the love of our homeland, we can do many things to protect and protect our nation from various threats. In the context of strengthening the State Defense in the community through various means of community participation in counteracting any threat, it is desirable to do so. This is again used as proof of the value of patriotism of the State Defense in the community. One example that can be illustrated is a very prominent thing lately happening through increasingly evolving and complex cyber system technology.

Almost all the needs of people's lives can use digital software and information systems that are increasingly integrated in the sector of individual life to the collective. This of course greatly affects social life in society so that events, both radicalism and riots involving certain groups can be conveyed very quickly to other parties. In connection with this, it is necessary to be aware of the attitudes and abilities of individuals to appropriately use, access, manage and build new knowledge in managing the media as a form of the State Defense in order to prevent issues that create disintegration of the nation.

Along with this, the people in the border region also need to get in the face of globalization and information from the Government foreign culture about the meaning of state defense awareness. Accompanied by economic improvement and prosperity through increased skills and through the provision of broad employment in border communities, so that they can be avoided from the exploitation of certain groups.

Educational environment. Efforts to increase awareness and the state defense in the educational environment for the younger generation need to involve several parties, ranging from universities, schools, and communities to the government level. By giving information in

raising awareness of State Defense and its implementation through Student Orientation (MOS) activities as well as Intra-School Student Organization (Student Organization) programs or Student Organizations. In addition, the implementation of state defense education can also be integrated in the curriculum design and application in the classroom. Besides that the application outside the classroom can be realized in the form of Scouting activities, Youth Red Cross (PMR), social services and other activities such as flag ceremonies that are accompanied by singing Indonesia Raya. Activities like this can increase the awareness of the defense of the State that is planted

Work environment. The ownership of the soul of the state defense must be applicable throughout the work and life environment. The meaning of application in the work environment is to be able to implement the values of Competence, Integrity, Transparent and Accountability, and have a strong character and are committed to making changes to be more competent, honest, transparent and can run the applicable rules.

The other forms of application are intellectual intelligence, spiritual and emotional intelligence, intelligence in survival or overcoming difficulties, never giving up in facing challenges. Always maintain good mental health and body and have a form of state defense skills.

On the other hand, the implementation of strengthening of the State Defense in the work environment can be done to increase knowledge, skills, and work attitudes that are conducive to the performance of employee performance, through the organization of employee education and training.

This employee training is based on a needs analysis that



Sumber foto : alsel.kemenag.go.id

integrates certain real quality conditions in line with the organization's long-term planning program. Meanwhile, as a result of the development of an era that continues to roll, where the problems faced are becoming increasingly complex and crucial, the things that need to be completed in various aspects for the work environment are by following the training of State Defense. This State Defense Training will add insight into nationalism and patriotism for its employees, as well as strengthen aspects of employee competence in the hope that the employee's performance can improve.

From the whole series of discussions above it can be summarized, that the awareness of state defense is essentially a willingness to serve the country and a willingness to sacrifice to defend the country. The country's defense spectrum is very broad, from the softest to the hardest.

Starting from good relations among citizens to jointly ward off the real threat of armed enemies. It also includes acting and doing the best for the nation and state. And Defending the Nation is the determination, attitude, behavior and actions of citizens in ensuring the survival of the nation and state, which is imbued with a love for the Unitary Republic of Indonesia.

State defense awareness will be realized if there is integration in cross-sectorial implementation, as a form of joint responsibility for the development of Human Resources/HR to realize the integrity and survival of the Unitary Republic of Indonesia. Hopefully there is an understanding that fostering awareness of defending the country as an effort to build the nation's character that is inseparable from national development. It can also be programmed in every government and non-government institution.

In the end, State Sovereignty will be upheld if all its citizens are aware and understand how to defend the State with the profession in their respective environments. So that the State will be resilient to face all forms of threats that come from within and outside the country, such as the threat of proxy war, hybrid warfare, cyber & network centric warfare, asymmetrical warfare, high-tech weapons systems, limited but prolonged wars.

In addition, the awareness of state defense means we have put forward the love of family and our children by educating and giving more attention to our fellow children, which means making Indonesia better in the future. ***

Reference

- Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 1954 concerning the Principles of Public Resistance
-
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 1982 concerning Basic Provisions for Defense and Security of the Republic of Indonesia
-
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1988
-
- Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights
-
- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 concerning National Defense
-
- MPR Decree No. VI of 1973, concerning the Concept of Archipelago Insight and National Security.
-
- MPR Decree No.VI of 2000, regarding the Separation of the TNI with the National Police
-
- MPR Decree No. VII of 2000 concerning the Role of the TNI and POLRI
-
- (<https://wp.lpmpjabargo.id/2019/04/25/pengunderstanding-rasa-cinta-tanah-air/>)

Implementation of State Defense Values in the Character Formation for the Early Children Education (Paud)

By:

Colonel Cba Dr. Yusuf Ali, SE., MM.

Lecturer in Defense University

(Sect. of Study Program, Faculty of National Security, IDU)

National Education aims to educate the life of the nation and develop the whole person, that is, people who have faith and devotion to God Almighty and virtuous character, have knowledge and skills, be healthy physically and spiritually, have a steady and independent personality, as well as social and national responsibility.

Through national education, it is hoped that it can improve the quality of national education and produce educated, faithful, knowledgeable, skilled, and responsible people (Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System). To deal with threats to the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, National Education must be able to provide students with a full understanding of State Defending policies. The policy to defend the country is contained in Article 27 Paragraph 3 of the 1945 Constitution, which reads "every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the state".

The rights and obligations of every citizen are regulated in Law No. 3 of 2002 concerning national defense, article 2 explains the nature of national defense is all universal defense efforts whose implementation is based on the awareness of the rights and obligations of citizens as well as confidence in their own strength. Besides that the discussion of the rights and obligations of

citizens in defending the country is also regulated in Law no. 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense. Article 6 of this Law states the participation of Citizens in the Defending of the State is carried out through citizenship education carried out through the Defense of State Defending Awareness.

The formation of the State Defense is an effort to realize the rights and obligations of every citizen to participate in efforts to defend the state as a reflection of national life that guarantees the rights of citizens to live prosperously, fairly, safely, peacefully, and prosperously. The total accumulation of state defense cadres until 2019 was 84.5 million people consisting of 94.61% of the elements (Ministries / Institutions, Higher Education, Local Governments), 4.76% Ministry of Defense, 0.48% TNI, and 0.16% The National Police. The Ministry of Defense Directorate General Defense Potential has carried out various outreach campaigns on National Defense using a variety of media. Including the making of the State Defending Comics for Kindergarten/TK, (Source; Minister of Defense Keynote speech at IDU State Defense Seminar, Sentul November 6, 2019).

Within the framework of the National Education System, the formation of students who have the attitude of Defending the State

is regulated in Permendikbud No 39 Year 2008 article 31 paragraph 1 regarding student development in forming students into democratic citizens and responsible. The Ministry of Defense's Education and Training Agency has compiled a National Defending Curriculum which was approved on May 3, 2016. One of the curriculums is made for Kindergarten-level students. The material taught includes basic fields of study in the form of knowledge about Indonesia. This material contains an introduction to the symbol of the State, ethnic diversity, religion to recognize the map of the region. Furthermore what about the inculcation of state defense values in Early Childhood Education (PAUD)? Early childhood education is the most basic education and occupies a position as the golden age and is very strategic in the development of human resources (Directorate of PAUD, 2005).

Currently there are many places that implement Early Childhood Education using various methods and curriculums and are generally influenced by the educational foundations that oversee it. For example, those who use education methods based on a particular religion, or according to general methods that have developed such as the Montesory method, although of course there is content in the curriculum that must follow the provisions of the Directorate General of PAUD Ministry of Education.

Early childhood education is considered as a mirror of a society. However, there is also a view that states that the attitude and behavior of a society is seen as a success or as a failure in education. Meanwhile the success of education depends on the education of children at an early age, because if the implementation of education in early childhood is good, the educational process at the age of adolescence and adulthood will increase as well. With the variety of current PAUD education models, the problem is how the country's defense values are implemented in character building in PAUD.

Government's Efforts to Apply the State Defense Values in Character Building of PAUD

The Government through the relevant Ministries and Institutions has made efforts to apply the values of the Martial Arts in character building in PAUD. This is shown from the results of research in the Directorate General of Early Childhood Education and Community Education (Dit.Gen PAUD and Public Education) Ministry of Education and Culture, and Dit. Gen of Defense Potential Ministry of Defense. The Ministry of Education and Culture through the Directorate General of PAUD and Public Education has developed a vision, mission and strategy for PAUD development until 2045.

From the research results, the literature study data obtained in the form of PAUD curriculum books (what, why, and how), early childhood education contained in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System Article 28. Furthermore, the Ministry of Education and Culture has the direction of PAUD development in 2011 -2045

which was divided into 5 stages namely: 2002-2011 service expansion phase, 2011-2015 quality consolidation stage, 2015-2025 national quality standardization stage, 2025-2035 international quality standard stage, 2035-2045 plenary service phase.

In 2015 the Ministry of Education and Culture's Early Childhood Education Development Directorate issued a Handbook used in the administration of PAUD. The manual consists of 10 manuals; 1. PAUD Learning Assessment Guidance, 2. PAUD Class Management Guidance, 3. PAUD Attitude Development Guidelines, 4. Guidance for Preparation of PAUD Learning Implementation Plan, 5. Guidance for Developing PAUD Learning Themes, 6. Guidance for PAUD Learning Management, 7. Curriculum Development Guidelines PAUD Education Unit Level (KTSP), 8. Basic Framework and Structure of 2013 PAUD Curriculum, 9. PAUD Curriculum. What, Why, And How, 10. Guidelines for Preparation of PAUD Unit Standard Operating Procedures.

In addition, in the 2013 PAUD Curriculum that was also created by the Directorate of PAUD Development explained the importance of planting attitudes. This attitude planting is closely related to character building. By looking at the development of science and technology that has developed very quickly, resulting in competition for human resources to be so sharp. This requires the implementation of education in the future not only to equip students with knowledge and skills alone, but the development of strong, persistent, and creative character becomes far more important in education. The Ministry of Education and Culture in this regard has established very clearly that education at each level develops attitudes, knowledge and skills competencies with different compositions. The earlier the level of education, the greater the composition of attitude competency development is. As the most basic level, PAUD is expected to be a strong foundation to shape the attitudes and character of students.

This is what was implemented in the 2013 PAUD Curriculum, building children's character is done by inculcating attitudes



Photo Source: Writer

through the development of attitude together, able to adjust, honest, competencies, which are not only a and polite in interacting with family, follow-up impact (nurturan) of the educators and/or caregivers, and development of knowledge and friends," Reflect social-emotional skills. This is rather a component intelligence as attitudes and that must be planned in a more behaviors that become self-feelings, mature and in-depth manner that others, and social values that are in is carried out continuously so as accordance with prevailing norms to form further habits into behavior and culture. Core competence is that ultimately becomes a good reached at the end of the PAUD program after the child has finished PAUD services. Furthermore Core Competencies are developed into Basic Competencies including:

The development of attitude competence requires a long and consistent process, but in its implementation it must still be adapted to the way early learning is carried out through fun and meaningful activities. The most important thing in this learning is the example of the teacher team, which certainly becomes a model for students. In the 2013 PAUD curriculum the core competencies for attitudes that must be developed consist of:

a. Core Competencies 1 Spiritual Attitude. "Receive the teachings of the religion they hold". Reflecting spiritual intelligence as an attitude of awareness to recognize the religion it professes.

b. Core Competencies 2 Social Attitudes. "Having a healthy lifestyle, curiosity, creative and aesthetic, confident, disciplined, independent, caring, able to work

- e). Have behaviors that reflect an attitude of confidence.
- f). Have behaviors that reflect observance of daily rules to train discipline.
- g). Having behavior that reflects patience (willing to wait the turn, want to hear when other people are talking) to train discipline.
- h). Have behaviors that reflect independence.
- i). Have behaviors that reflect caring and willing to help if asked for help.
- j). Have behaviors that reflect respect and tolerance to other people.
- k). Having behavior that can adjust.
- l). Have behaviors that reflect an attitude of responsibility.
- m). Having behavior that reflects honest attitude.
- n). Having behavior that reflects a humble and polite attitude to parents, educators and friends.

In the PAUD curriculum book



Photo Source: Saiful Studen Internship

explained about the range of the / 2015 concerning Guidelines for target age range of early childhood Fostering State Defense Awareness in Indonesia from 0-6 years, early for Primary / MI Teachers.

childhood services programs in

Indonesia consist of kindergartens for children aged 4-6 years, priority awareness of the defense of playgroups for children aged 2- 4 years, Priority Child Care Park 0-6 implementation instructions years old, and ECCE (Kindergarten) number 03/X/2011, is to support (Children 0-6 years). Kindergartners enter the formal education human resources in understanding pathway, while others enter the and realizing the rights and non-formal education pathway. obligations of defending the Efforts that have been made by the country democratically, through Directorate of PAUD Development fostering efforts to foster, maintain of the Directorate General of and develop the values of national PAUD Ministry of Education have defense. To realize these goals included how the implementation at the kindergarten/elementary of character building in PAUD, but level is to form the personality have not specifically explained the of students who are pious, have content of the values of the Martial Arts, even though the contents of the content from the guidance books and PAUD curriculum books already cover the essence of the state defense values.

The purpose of fostering playgroups for children aged 2- 4 the state as explained in the years, Priority Child Care Park 0-6 implementation instructions years old, and ECCE (Kindergarten) number 03/X/2011, is to support (Children 0-6 years). Kindergartners enter the formal education human resources in understanding pathway, while others enter the and realizing the rights and non-formal education pathway. obligations of defending the Efforts that have been made by the country democratically, through Directorate of PAUD Development fostering efforts to foster, maintain of the Directorate General of and develop the values of national PAUD Ministry of Education have defense. To realize these goals included how the implementation at the kindergarten/elementary of character building in PAUD, but level is to form the personality have not specifically explained the of students who are pious, have content of the values of the Martial Arts, even though the contents of the content from the guidance books and PAUD curriculum books already cover the essence of the state defense values.

discipline, can apply national values in daily life, realize themselves as tolerant social beings and know the environment based on the absence of personality that understands diversity and can apply national values in everyday life.

Explanation of the importance of state defense values to be implemented into character building in PAUD still needs to be emphasized again so that there is a common understanding from PAUD managers including stake holders about what state defense values are and how they are implemented in PAUD. Of course, synergy with stakeholders including relevant number 03/X/2013 also explained Ministries / Institutions such as the scope of the Defense of State the Ministry of Defense must be improved so that the product Defending Awareness (PKBN) at the TK level, ie PKBN can be implemented manuals and rules become a unified whole in terms of the subjects, local content, and/or implementation of state defense values in education, especially in PAUD.

It was also explained that these objectives were implicitly accommodated in the Competency Standards (SK) and Basic Competence (KD) of relevant subjects (eg Citizenship Education/PKN) but explicitly needed to be stated in the subject indicators. In the implementation guideline number 03/X/2013 also explained the scope of the Defense of State the Ministry of Defense must Defending Awareness (PKBN) at the TK level, ie PKBN can be implemented through integration in relevant subjects, local content, and/or sustainable self-development.

In accordance with the level of student development, the scope still refers to the goals and objectives relating to the realm of cognitive, affective, and psychomotor through various kinds of coaching with the emphasis on psychological and physical coaching. In detail the scope of PKBN for TK is:

The Ministry of Defense through the Directorate General of Defense Potential (Ditjen Pothan) in 2011 issued the Implementation Guideline Number: Juklak / 03 / X / 2011 concerning Guidance for Defending State Defense Awareness for Kindergartens - Elementary Schools (SD), and in Year 2015 was issued Implementation Guideline Number: operational guidelines / 06 / VIII

1. Psychiatric Development.

- a. Introduction of homeland love

through flag ceremonies, singing, playing and recreation.

- b. The introduction of a sense of solidarity through playing together.
- c. Introducing a sense of cleanliness and environmental preservation, through hiking and light work.
- d. The introduction of discipline, through simple lines.
- e. The introduction of obedience, obedience and respect for parents and teachers through exemplary stories.

2. Spiritual Development.

- a. Introduction of religious beliefs through the story of God's greatness The Almighty and the simple practice of the teachings of the religion it adheres to.
- b. The introduction of moral character through stories and pictures, about religion and national cultural diversity.

3. Personality Development.

- a. Introduction of good and bad behavior through stories, songs, and socio drama.
- b. Introduction of traditions and historical relics that have noble values of the struggle of the nation in the surrounding area.
- c. Good and correct language recognition.

4. Knowledge Development.

- a. Introduction of state symbols.
- b. Introduction of national and regional songs.
- c. Introduction of traditional musical and dance

- instruments.
- d. Introduction of traffic through pictorial stories, singing, travel and playing in a traffic park.
- e. Introduction to the location of residence, school and the surrounding environment.
- f. Introduction of various types of Family Medicinal Plants (TOGA).
- g. Habituation tells the story of heroism from parents, teacher and other media.
5. Physical development.

a. Introduction to sports through Indonesian Morning Gymnastics (SPI), Physical Fitness Gymnastics (SKJ) and other exercises that have PKBN values (for example, creative exercises accompanied by regional and national songs).

- b. Introduction to simple traditional dance moves.
- c. Introduction of various skills through game forms.

The essence of the implementation instructions made by Dir. Gen Defense Potential are essentially the same as those made by the Ministry of Education and Culture when viewed from the formation of character in PAUD, but the implementation instructions made

Matrix of Efforts to Implement the Cultivation of State Defense Values in Character Building of PAUD

No.	Material	Ministry of Defense	Ministry of Education and Culture
1.	Familiarization	<ul style="list-style-type: none"> - Has conducted socialization about state defense to the public in general as well as to education managers, - It is still done in a limited way so that the PAUD management environment is still a lot that has not received socialization about the Defending the State (the values of State Defending which must be instilled in PAUD) 	<ul style="list-style-type: none"> - What has been socialized is the PAUD curriculum and the PAUD implementation manual (10 Manuals).
2.	Preparation of operational guidelines/guidelines.	<ul style="list-style-type: none"> - Juklak / 03 / X / 2011 concerning Guidance for Defending State Defense for Kindergartens (Elementary Schools) <ul style="list-style-type: none"> - Elementary Schools (SD). - Implementation Instructions Number: Juklak / 06 / VIII / 2015 concerning Guidelines for Fostering State Defense Awareness for Primary / MI Teachers 	<ul style="list-style-type: none"> - The Handbook used in the administration of PAUD, the handbook consists of 10 manuals: <ul style="list-style-type: none"> 1). PAUD Learning Assessment Guidelines, 2). PAUD Class Management Guidelines, 3). PAUD Attitude Development Guidelines, 4). Guidelines for Preparation of PAUD Learning Implementation Plan, 5). Guidelines for developing PAUD Learning Themes, 6). PAUD Learning Management Guidelines, 7). Guidelines for Preparation of PAUD Level Education Curriculum (KTSP), 8). Basic Framework and Structure of 2013 PAUD Curriculum, 9). PAUD Curriculum. What, Why, And How, 10). Guidelines for Preparing PAUD Unit Standard Operating Procedures.

3.	Fill in operational guidelines.	It has clearly explained in detail about the cultivation of the values of state defense in PAUD	Does not specifically contain 5 values of national defense as a whole, and only mentions the love of the motherland, and national consciousness.
4.	Perception of the importance of inculcating the values of the country's defense.	Very important, it can be seen from the national defense program conducted by the Ministry of Defense	Important, it can be seen from the lack of active national defense programs carried out, possibly because the Ministry of Education and Culture believes that the Ministry of Defense as the leading sector for the national defense program



Photo Source: Writer

by the Ministry of Defense are more implementative regarding all state defending values that can be instilled in students in PAUD. Efforts made by the Ministry of Education and Culture regarding the implementation of instilling the values of state defense in character building in PAUD can be seen through the matrix below.

Conclusion

The Government through the relevant Ministries and Institutions has made efforts to apply the values of the Martial Arts in character building in PAUD. This is shown from the results of research in the Directorate General of PAUD Ministry of Education, and the Directorate General Defense Potential. The Ministry of Education and Culture through the Directorate of PAUD Development of the Directorate General of PAUD has developed a vision, mission and strategy for PAUD development until 2045.

From the research results, the literature study data obtained in the form of PAUD curriculum books (what, why, and how), early childhood education contained in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System Article 28. Furthermore, the Ministry of Education and Culture has the direction of PAUD development in 2011- 2045. Likewise with the Ministry of Defense, in the framework of implementing the values of State Defending in PAUD, the Ministry of Defense through the Directorate General of Defense Potential (Dir. Gen. Defense Potential) in 2011 issued an Implementation Guideline Number: Juklak / 03 / X / 2011 concerning Guidelines for Guiding National Defense Awareness for Kindergarten (Elementary School) - Elementary School (SD), and in 2015 Implementation Guideline Number: Juklak / 06 / VIII / 2015 concerning Guidelines for Developing State Awareness for SD / MI Teachers.

From the research both through interviews and observations in the field, it can be concluded that the socialization of the cultivation of the values of State Defending to PAUD managers and to the Office of Education and Culture in the regions is still needed. Thus, even though the essence of State Defending values has already appeared in the PAUD curriculum, teachers and PAUD managers still assume that it is part of the teaching and learning process in PAUD which aims to develop aspects of cognitive, motoric and other development, and not from awareness about the importance of planting the values of defending the country early on in early childhood.

Therefore, comprehensive steps are still needed either through direct socialization through face-to-face or through social media which currently can be used to socialize the importance of instilling the values of state defense in PAUD. The Ministry of Defense can directly involve Village Development NCO (Babinsa) from the Army to help socialize about National Defense, especially inculcating the values of State Defending in PAUD by coordinating with PAUD managers in their area.

To anticipate limited funds, the material in the form of implementation instructions and socialization guidelines can be accessed by Babinsa Online and can be distributed to PAUD managers online as well. The Ministry of Defense can also coordinate with the Indonesian National Police to help through the NCO Guidance for Security and Public Order (Babinkamtibmas). Because of the large number of PAUDs spread throughout Indonesia, this socialization must be carried out on a massive scale by involving the Regional Government (Pemda), especially through the Education Office in the regions.

Reference

Legislation

- Indonesia. 1945 Constitution
- _____ Law No. 3 year 2002 on National Defense
- _____ Law No. 20 year 2003 on National Education System
- ----- UU no. 23 of 2019 concerning PSDN

Book

- Anita. (2011). Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyono, K. (2007). Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metotologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carol, Seefeldt & Wasik, B.A. (2008). Early Education: Three-, Four-, and Five- year-olds Go to School (Pius Nasar, Terjemahan). New Jersey: Pearson Education.
- Ghony, M.D dan Almanshur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maxwell, Alex, J. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Amerika Serikat: Sage.
- Moeslichatoen. (1999). Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Putra, N. (2012). Penelitian Kualitatif: Proses Aplikasi. Jakarta: Indeks.
- Rohman, A. (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rusdinal & Elizer. (2005). Pengelolaan Kelas di TK. Jakarta: Depdiknas. Siswoyo, D. (2011). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Dirjen Pendidikan Islam Depatemen Agama RI,UUSPN Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tahun 2006.
- Muhammad Fadlillah, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jogjakarta:Ar- Ruzz Media, 2013).
- Muhammad Fadlillah, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jogjakarta:Ar- Ruzz Media, 2013),16.
- Hartono, Pengertian Pendidikan, <http://fatamorghana.wordpress.com>, diakses pada 20 Mei 2014.
- Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter, (Jakarta: Grasindo, 2007). Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Kailan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendekatan Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005).
- Suyanto, S. (2004: 146). Metode Pengajaran Anak Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo dkk, (2004: 41). Pendidikan Bela Negara. Yogyakarta: UNY Press. Sudiyono. (2007). Buku Ajar dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan: Yogyakarta.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, S. (2008). Wawasan Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. Sunarso dkk. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press. Syafaruddin. (2008). Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta; Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2012). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, H. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahab, S.A. (1997). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2013). Dasar-Dasar Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana.
- Yuliani. (2009). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Permata Puri Media.
- Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Pustaka Pelajar, 2006
- Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group, 2014
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Tempo, (10-16 April 2017). "Diskriminasi rasial".
- Kompas, (11 Januari 2017), Tebarkan kebencian tumpulkan pikiran.
- Kompas, (16 Januari 2017), Menenun Semangat Kebangsaan (Fathorrahman Ghufron).
- Kompas, (16 Januari 2017), Bangkitnya Kekerasan Pembelajaran (Saifur Rohman).
- Kompas, (02 Februari 2017), Radikalisme, Pengajaran bisa sentuh anak usia dini.
- Kompas, (06 Maret 2017), Mem manusiakan Manusia.

Internet

- Hartono, Pengertian Pendidikan, <http://fatamorghana.wordpress.com>, diakses pada 20 Mei 2014.
- Koran/Majalah

Electric Power, Critical Infrastructure and National Security

By: Darma A. S. Irfiansyah
(IDU alumnus)



Photo: "Indonesia at Night" Source: NASA Earth Observatory, 2016.

IPower (electricity) outages of Indonesia with long duration, is certainly not new events in disrupting public activities, the infrastructure, the author's national Indonesia. Each region must have national economy and government security framework consist of experienced the same thing, at operational. No wonder President interrelated security factors/ least the incidence of rotational Joko Widodo then assert PLN to aspects between infrastructure, blackouts. Even today, some regions conduct an investigation and economic, and energy. National in Indonesia still experiencing careful planning in order that similar critical infrastructure is related blackouts, due to lack of electrical incidents would not be happen in to or are part of the national supply. the future.

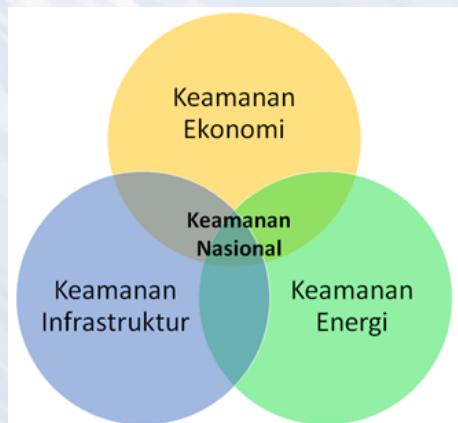
In the context of national critical infrastructure, the author's national economy and government security framework consist of experienced the same thing, at operational. No wonder President interrelated security factors/ least the incidence of rotational Joko Widodo then assert PLN to aspects between infrastructure, blackouts. Even today, some regions conduct an investigation and economic, and energy. National in Indonesia still experiencing careful planning in order that similar critical infrastructure is related blackouts, due to lack of electrical incidents would not be happen in to or are part of the national supply. the future.

Indonesia has experienced a number of mass blackouts such as in 1997, 2002, 2005, and the latest one of which has become a widespread concern is the power outages that occurred in DKI Jakarta and West Java last August 2019. Power outages (blackouts) are generally viewed from energy perspective, but in this article, the author presents a view from the perspective of "economic security". The arguments is because the problem is not in the lack of energy, or the lack of fuel supply for electricity generator, but the disruption/failure of the electricity infrastructure and national vital objects, are vital assets, so a threat to critical infrastructure (especially electricity infrastructure) are a threat to the national economy, which can affecting state's sovereignty, and disrupting national economics, social, political, and

This incident suddenly became a public debate and media commentary, because this case occurred in the capital city. This consideration is based on

Indonesia constitution (UUD 1945)

article 33 paragraph 2) which power, the single most important in the concept of "Economic Security", both in terms of scope of study (such as: macroeconomics, microeconomics, finance, international trade, etc.), based on ideological approaches (liberalism, marxism, etc.), based on economic subjects (country or individual), or based on a semiotic study of the definition of "economy" itself (production, distribution, consumption, scarce resources, etc.).



important for the state and which control the lives of many people are controlled by the state. Hence, several critical infrastructures are controlled and owned by the government through State-Owned Enterprises (SOE) / BUMN such as PLN.

Mass power outages are a matter of economic security that is related to and/or can affect national security. Threats to the sustainability and continuity of energy production/supply, protection of national critical infrastructure and sources of national economic production, become an important part and should be a concern to policy makers in the national defense and security sector.

Economic Security

National security concept is effectively ensure the material expanding. The development of resources, which are needed by the security concept which is associated with threats originating from the military power of other state, develops wider including non-military / non-traditional threats. So national security in essence is anything that can threaten the sovereignty and national interests of a state.

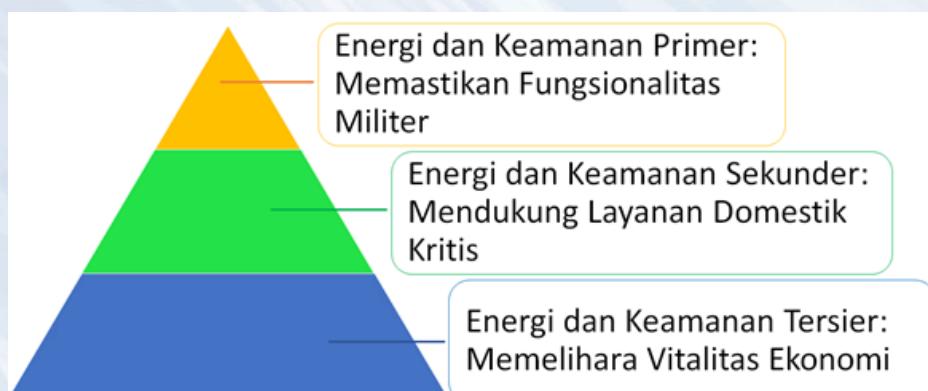
Michael Morell (2016) said that "the health of a nation's economy is the single most important determinant in its ability to protect itself, the single most important determinant in its ability to project

According to Ronis (2011), national security is societal, political, and economic strength. Economic security is a major element of national security. No matter how we look at national security, there can be no question of the need to include the economic viability of our nation². Without capital, there is no business; without business,

there is no profit; without profit, there are no jobs. And without jobs, there are no taxes, and there is no energy, and the third level is military capability³.

The economic security represents a complex concept, which, essentially, refers to the ability of a state, of a society, to maintain economic vitality.⁵ Thus, the protection of energy infrastructure can be viewed in terms of maintaining national

timely, cursively, plentifully and



Source: Phillip E. Cornell, "Energy and the Three Levels of National Security: Differentiating Energy Concerns within a National Security Context", Connections, Vol. 8, No. 4 (Fall 2009).

An intentional disruption of electricity supplies would affect the other dimensions of national security, the economy, security, in order to reach their ultimate level of operational power grids and their sources are preservation ... economic security widely dispersed, this is a challenge ensures not only the safeguarding of resources for the state and organizations and structures⁶. national vitality, but also the development potential, under estrangement circumstances for sovereignty and independence⁴ (Rotaru, 2009)

Power blackouts have three major effects according to Alhelou et.al (2019) i.e: social, economic, and political. The social impacts are affected medical systems, rail traffic disturbed, and road traffic disturbed. The political impact are There are various approaches the vulnerability of the security



Source: Hassan Haes Alhelou, Mohamad Esmail Hamedani-Golshan, Takawira Cuthbert Njenda, and Pierluigi Siano, A Survey on Power System Blackout and Cascading Events: Research Motivations and Challenges, Energies 2019, 12, 682, page 16.

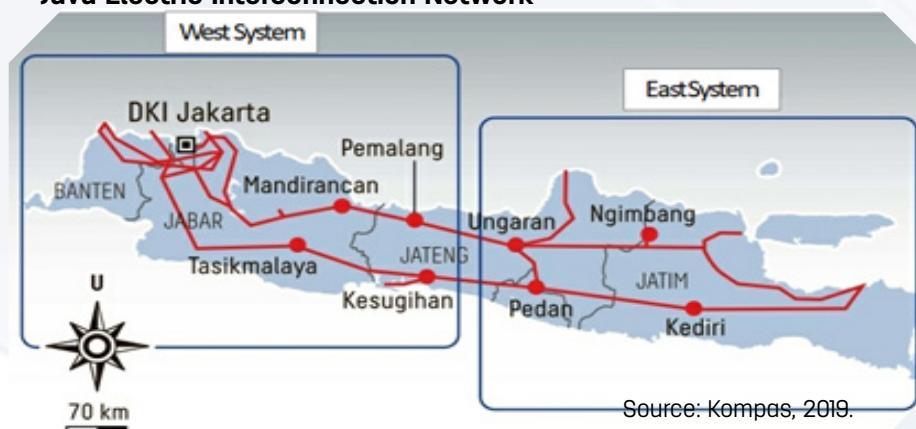
system, political unrest/instability, hailing services), e-commerce, and walk to the nearest station. and disrupted business. The online payment transaction, ATMs, Road intersections also fell into disorganization in many places, economic impact are business interruptions, internet breakdown, and payment transaction interruptions.⁷

Paganini (2015) said, "Economic impacts include direct damage to assets and infrastructure, decline in sales revenue to electricity supply companies, loss of sales revenue to business and disruption to the supply chain."⁸

Hotels and F&B industries also interrupted because consumers are not able to do online reservation, or payment transactions either cash or cashless (Ulung, 2019)⁹. While Indonesian Retailers' Association (CORE) Research Director, said claimed the retail industry suffered economic loss around 200 billions rupiah (Siregar, 2019)¹⁰.

Piter Abdullah Redjalam, Center of Reform on Economics Indonesian Retailers' Association (CORE) Research Director, said claimed the retail industry were the blackouts affecting 30% of Indonesia economic. (Lidyana, 2019) This is because Java island is the centre of gravity of Indonesia economic¹³. Nearly 60% of economic activity is in this island, and it contributes to 58.5% of total national GDP¹⁴. (Yudhistira, 2019) In top of that, Jakarta as Indonesia capital city, it's economic contribution to national GDP reach around 17-18% of national GDP¹⁵ (Rahardyan, 2019) It is the highest contribution among other cities in Indonesia, and 20% of Indonesia economics is from Jakarta and nearby cities¹⁶. (Jefriando, 2019)

Java Electric Interconnection Network



Source: Kompas, 2019.

In August 2019, power outage power outage and caused financial paralyzed cities affected and loss around 375 billion rupiah caused business disruption and (Pratomo, 2019)¹¹.

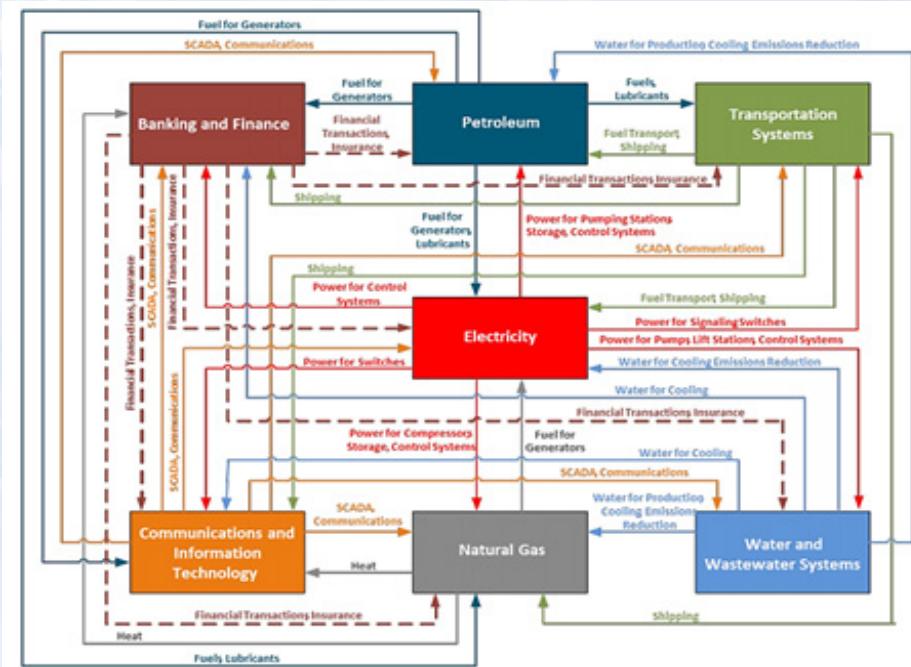
social disorder. Telecommunication shut down caused offline network. JakartaPost (2019) reporting Businesses which dependent on telecommunication and data to operate, causing severe traffic service were disrupted, such as congestion, while electricity-digital platform business, online powered commuter line and MRT transportation (app-based ride- trains were brought to a halt forcing passengers to disembark

Critical Infrastructure (CI)

Critical infrastructure is a term used by governments to describe assets that are essential for the functioning of a society and the economy¹⁷. (Hokstad et. al, 2012)

According to Cavelti (2008), critical infrastructures are usually defined as systems or assets so vital to a country that any extended incapacity or destruction of such

Critical Infrastructure Interdependence



Source: Duane Verner, Frederic Petit, and Kibaek Kim, Incorporating Prioritization in Critical Infrastructure Security and Resilience Programs, Homeland Security Affairs, Volume 13 Article 7 (October 2017).

systems would have a debilitating impact on security, the economy, national public health or safety, or any combination of the above¹⁸.

The Minister of Defense Regulation No. 82 of 2014, define critical infrastructure is an assets, systems, and networks, in forms of physical and virtual, which are vital, where disruptions to it will potential threatening the security, stability of the national economy, public safety and health or a combination of them.

Cavelti (2008) explained that some infrastructures are regarded as "critical" (in the sense of geographic regions, and as "vital, 'crucial', 'essential') by the authorities because their prolonged unavailability would, in all likelihood, result in social instability and major crisis. Today, these critical infrastructures mostly take the form of interconnected, complex and increasingly virtual systems¹⁹.

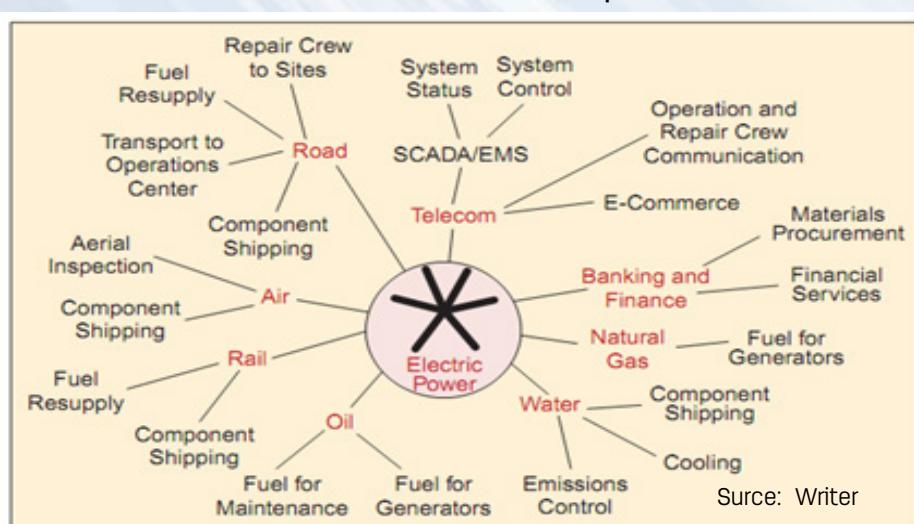
Interconnected means that critical infrastructure has interdependencies relations between them. That is the reason what happens to one infrastructure can directly and indirectly affect

and Communication Technology; Agriculture; National Defense and Strategic Industry; Emergency Service; and, Water Resources²⁰.

Infrastructure systems can be subjects to threats and hazards of different kinds and then partially or totally collapse. The threats and hazards can be natural disasters, adverse weather, technical failures, human factors, labor conflicts, sabotage, terrorism, and acts of war. Major power outage affects all vital activities in society. Electric power systems, as most other complex systems, can often be represented in a useful way as networks²¹. (Holmgren, 2006)

Adams Jr. (2015) categorized critical infrastructure into 3 groups

Electric Power Infrastructure Dependence



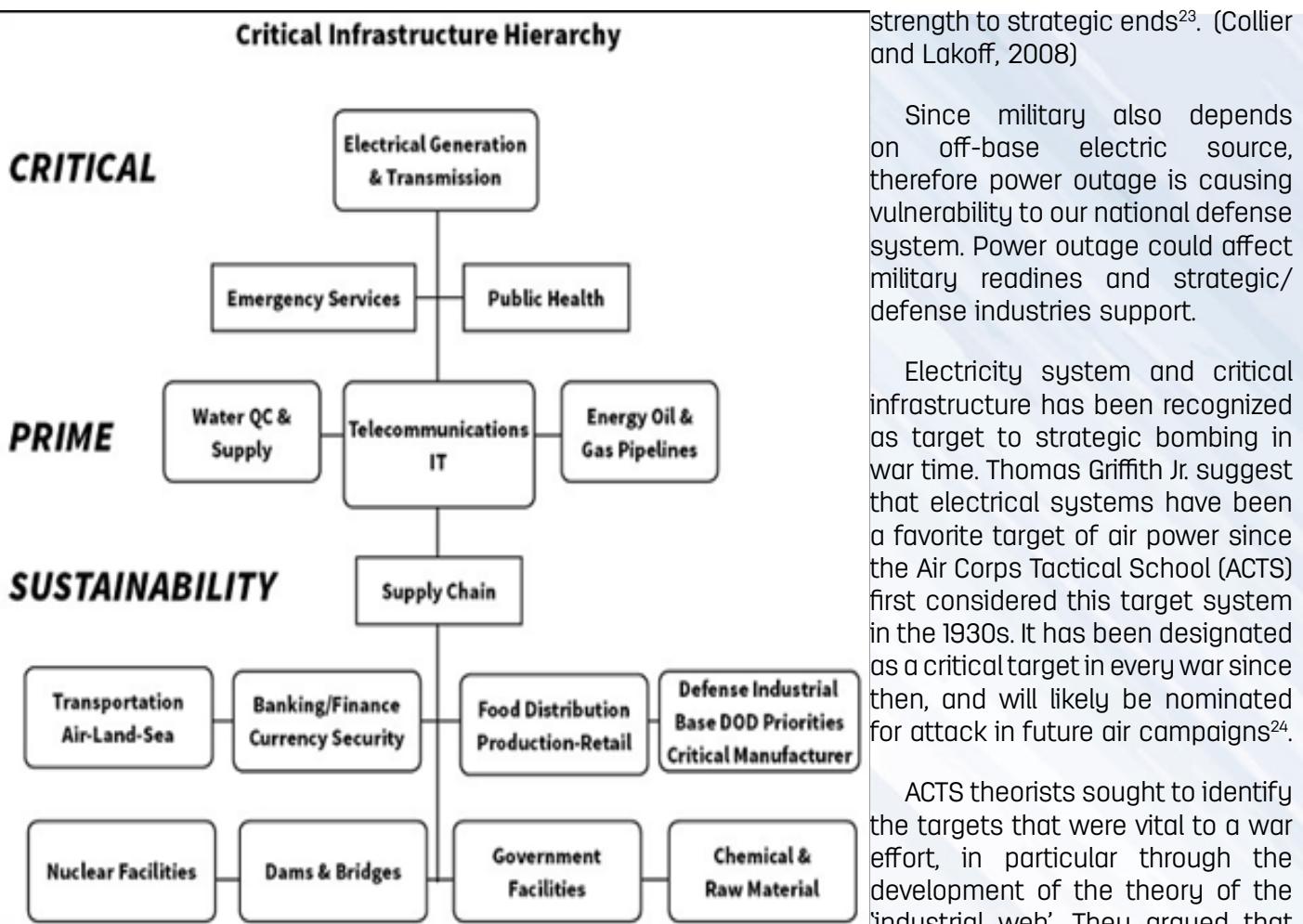
other infrastructures, impact large of hierarchy: critical, prime, and as "critical" (in the sense of geographic regions, and send sustainability. The top hierarchy were critical group which consist of electrical generations and transmission, emergency service and public health. This underline the critical value of certain global economy.

There is no description (at least according to legal document) what constitutes Indonesia's critical infrastructure. BSSN has the other version of "critical infrastructure"

infrastructure. BSSN has the other version of "critical infrastructure" which consist of 10 sectors, i.e: Law Enforcement; Energy and Mineral Resources Sector (including electricity); Transportation; Financial and Banking; Health; Information

In several past years, there terms called National Critical Infrastructure such as:

- Stuxnet to Iran's nuclear program in 2009
- Black Energy Trojan attack



Source: John A. Adams, Jr., *Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk*, Friesen Press, 2015, page 96.

towards the Ukrainian power grid in 2015.

- Industroyer attack towards the Ukrainian power grid in 2016.
- Used Shamoon to attack systems at Aramco, Saudi Arabia's national oil company in 2012.
- Used malware attacks on the SWIFT network to attack banks in Latin America and Asia from 2015 onwards
- Attacked critical safety systems for industrial control units at a Saudi oil and gas company in 2017 using Triton.
- Held Britain's National Health Service hostage with the WannaCry ransomware attack in 2017

- NotPetya malware hit energy and transport organizations in Europe, the U.S., Russia and Ukraine in 2017
- Targeted SCADA systems, particularly in Ukraine, with VPNFilter malware in 2018.

There is only one non-cyber attack (sabotage) on critical infrastructure (energy infrastructure) occurred in Indonesia, causing the explosion at the Suralaya power plant transformer in 2012. While in contrast, no cyber attacks to critical infrastructure have been reported.

The Defense Aspect of Critical Infrastructure

Military strategist stated that military strength depended on the economic and social vitality of the nation, and on the state's capacity to mobilize and direct that vital

strength to strategic ends²³. (Collier and Lakoff, 2008)

Since military also depends on off-base electric source, therefore power outage is causing vulnerability to our national defense system. Power outage could affect military readiness and strategic/defense industries support.

Electricity system and critical infrastructure has been recognized as target to strategic bombing in war time. Thomas Griffith Jr. suggest that electrical systems have been a favorite target of air power since the Air Corps Tactical School (ACTS) first considered this target system in the 1930s. It has been designated as a critical target in every war since then, and will likely be nominated for attack in future air campaigns²⁴.

ACTS theorists sought to identify the targets that were vital to a war effort, in particular through the development of the theory of the 'industrial web'. They argued that the complex interdependencies of modern economic systems were their essential weakness. Donald Wilson wrote in 1938 that the modern economy was composed of 'interrelated and entirely interdependent elements'. By attacking these targets, one could quickly – and economically – paralyse an enemy war effort.

Electric power was seen as a key target set in the entire industrial web theory. An attack on electric power was attractive for several reasons: it would affect, simultaneously, the social and economic spheres of a nation; the targets were relatively easy to locate and were believed to be vulnerable to air attack; the generators and transformers were difficult to replace; and perhaps most importantly, this type of attack was economical, because a small amount of destruction would yield, impressive results.

A generic electrical power system is composed of four separate subsystems: generation,

transmission, distribution, and control. The most immediate method for cutting off electricity in the generation phase would be to attack the buildings that contain the turbines and generators.

While the result of attacking on national power system may vary (successfull or not) depends on enemy's national electric system, and other factors, nevertheless it still among top bombing targets in war time.

Protection of Critical Infrastructure

Critical infrastructure protection is a concept that is related to the preparedness and response to serious incidents involving critical infrastructure of a region or a nation. That the inability or destruction of the system and assets will have the effect of weakening national security, national economic security, public health nationally and the safety of a nation. Systems and networks that form infrastructure nationally are usually strong whole systems, but disruptions to one system can have dangerous consequences for other sectors²⁵. (Setiawan, 2011)

Protection of each critical component is paramount, yet the element that is the most important to the overall economy, security, and safety the nation is the electric grid. Electricity is the lifeblood of today's modern world and a prime necessity for all citizens. It powers economies, consumer conveniences, national security, critical telecommunications, and the industrial production/supply chain ability to deliver competitive advantages to global markets²⁶. (Adams Jr, 2015)

There are two approaches in Critical Infrastructure Protection (CIP): cyber approach, and non-cyber approach. Recently, most of references about CIP are emphasizing on cyber defense/security. Nevertheless, threat to CI are not solely based on cyber attack, but vary from natural resources, the attack of physical infrastructure, sabotage, insider threat, etc.

From legal perspective, Indonesia has a number of regulations that indirectly related to national critical infrastructure although it does not specifically address the protection of critical infrastructure, such as:

- Presidential Decree 63/2004 on National Vital Objects Security
- Law 17/2011 on State Intelligence

- Minister of Defense Regulation No. 82/2014 on Cyber Defense Guidelines
- Minister of Industry Regulation 18/2018 on Guidelines for the Establishment and Evaluation of Establishment of National Vital Objects in the Industrial Sector
- Minister of ESDM Regulation 48/2018 on the Establishment of National Vital Objects in the Energy and Mineral Resources Sector
- Law 5/2018 on Terrorism.

Besides that, several articles in the Penal Code also cover the protection of infrastructure (not mentioning critical infrastructure) such as Articles 406 – 408.

Indonesia government are also finalizing draft of Presidential decree regarding to National Strategic Vital Objects, which will differ from National Vital Objects regulations, including the use of military forces in responding to the threat.

In spite of that, a number of regulations seems confusing because there are overlapping terms and definitions between: Critical Infrastructure, National Vital Objects, Strategic Vital Objects and National Critical Infrastructure Vital Objects.

Post-blackouts events, PLN also has signed several MoU with TNI to tackle defense security issues regarding to electricity infrastructure. The MoU raise questioned related to legal and civil – military relations issue. Referring to Presidential Decree 63/2004 on National Vital Objects Security, the involvement of military forces should only be done by request from the Indonesia Police.

Sambhi (2018) mentioned that the Indonesian military plays a critical role in securing the country's energy supplies and infrastructure. Energy security policies also impact the military, given its need for a constant supply of fuel and electricity, particularly in light of increasing reliance on networked electronic systems and the planned acquisition of more modernised air and naval platforms²⁷.

In the other hand, Li et.al (2005) said among threats to power infrastructure, sabotage is probably more difficult to handle due to its secretive and hostile characteristics. Sabotage can cause great damage to power grid facilities, including nuclear power stations or major transmission facilities. Sabotage can also involve communication, computer and information system damage, and cyberattacks that can severely undermine the reliability of the electricity supply. Clearly sabotage is intended to cause maximum damage and disruption to the society. Due to these threats, it is critical to develop defense plans and technologies for the electric power and related infrastructures²⁸.

Sabotage is mentioned in Law No. 3 of 2002 on National Defense, as one of military threat. Military threats could be

in the form of: aggression, invasion, bombardment, blockade, territorial sovereignty violations, sabotage, international terrorism networks, etc. Two military threats related to critical infrastructure are in form of sabotage to damage military installations and national vital objects that endanger the nation's safety, and form of armed terror carried out by international terrorism networks or in collaboration with domestic terrorism or high-escalating domestic terrorism that endanger the country's sovereignty, territorial integrity, and the safety of the whole nation.

However, the explanation of article 7 in Law 3 of 2002 delimit the action requirements –by definition– only when using organized armed forces and considered jeopardize the state's sovereignty, territorial integrity and the safety of whole nation. An act without using organized armed forces could not be categorized as a military threats thus the government is not allowed to use military force.

This is dilematic because Indonesia government also has revoked the Anti-Subversion Law (Presidential Decree No. 11 of 1963) in 1999 (Law 26 of 1999) since it is considered to be contrary to human rights and state principles. Whereas, this law provide definition of crime act against state such as sabotage, espionage, etc. This issue was tried to be resolved in the draft of new Penal Code but was rejected by the Parliament after series of students demonstration.

Based on the latest power outage events and contemporary security dynamics, securing national critical infrastructure especially electricity infrastructure is a must due to its vital and critical position. Nevertheless, clear definition of critical infrastructure and operational regulations is needed, so that the involvement of TNI also have clear legal basis. The inability to address this issue, will affecting national economic and overall national security.***

Reference

¹Michael Morell, The Link Between Economic and National Security, https://www.thecipherbrief.com/column_article/the-link-between-economic-and-national-security, 13 Maret 2018.

²Sheila R. Ronis (ed), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, National Defense University, 2011, hal. ix.

³Sheila R. Ronis (ed), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, National Defense University, 2011, hal. 17.

⁴Marius-Petre Rotaru, "Economic Security - Organic Dimension of National Security," MPRA Paper 17936, University Library of Munich, 2009, hal. 1.

⁵Phillip E. Cornell, "Energy and the Three Levels of National Security: Differentiating Energy Concerns within a National Security Context", Connections, Vol. 8, No. 4 (Fall 2009).

⁶Massoud Amin, "Security Challenges for the Electricity Infrastructure (Supplement to Computer Magazine)", Computer, Vol. 35 (4): 8, April 2002.

⁷Hassan Haes Alhelou, Mohamad Esmail Hamedani-Golshan, Takawira Cuthbert Njenda, dan Pierluigi Siano, A Survey on Power System Blackout and Cascading Events: Research Motivations and Challenges, Energies 2019, 12, 682, hal. 16.

⁸Pierluigi Paganini, Business blackout, economic impact of a cyber attack against a power grid, <https://securityaffairs.co/wordpress/38765/cyber-crime/cyber-attack-power-grid.html>, 22 Juli 2015.

⁹Kurniawan Ulung, Major power outage hit hotels, F&B businesses in Jakarta and surrounds, TTG Asia, <http://www.ttgasia.com/2019/08/07/major-power-outage-hit-hotels-fb-businesses-in-jakarta-and-surrounds/>, 7 Agustus 2019.

¹⁰Efrem Siregar, Duh! Listrik Mati 8 Jam, Ritel Ditaksir Rugi Rp200 Miliar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805162318-4-89945/duh-listrik-mati-8-jam-ritel-ditaksir-rugi-rp200-miliar>, 5 Agustus 2019.

¹¹Harwanto Bimo Pratomo, Akibat Listrik Padam, Industri Petrokimia Rugi Rp375 Miliar, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/akibat-listrik-padam-industri-petrokimia-rugi-rp-375-miliar.html>, 5 Agustus 2019.

¹²Blackout causes citywide disorder, The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/04/blackout-causes-citywide-disorder.html>, 4 Agustus 2019.

¹³Vadhia Lidyana, Imbas Listrik Padam Massal, Ekonom: 30% Perekonomian RI Terdampak, Detik.com, <https://finance.detik.com/energi/d-4652470/imbas-listrik-padam-massal-ekonom-30-perekonomian-ri-terdampak>, 5 Agustus 2019.

¹⁴Aria W. Yudhistira (ed), Pusat Ekonomi Nasional Masih di Jawa, KataData, <https://katadata.co.id/grafik/2019/02/13/pusat-ekonomi-nasional-masih-di-jawa>, 13 Februari 2019.

¹⁵Aziz Rahardyan, Anies : Secara Alami, Jakarta Sudah Jadi Ibu Kota Ekonomi Indonesia, Bisnis.com, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190829/384/1142529/anies-secara-alami-jakarta-sudah-jadi-ibu-kota-ekonomi-indonesia>, 29 Agustus 2019.

¹⁶Maikel Jefriando, Ini 10 Daerah dengan Ekonomi Terbesar di RI, Detik.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3496150/ini-10-daerah-dengan-ekonomi-terbesar-di-ri>, 9 Mei 2017.

¹⁷Per Hokstad, Ingrid B. Utne, Jørn Vatn, Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures: A Guideline for Analysis, Springer - Verlag, 2012, hal 19.

¹⁸Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 40.

¹⁹Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 1.

²⁰Arif Rahman, Selain Listrik, BSSN Telah Petakan 10 Infrastruktur Kritis, Cyberthreat, <https://cyberthreat.id/read/1929/Selain-Listrik-BSSN-Telah-Petakan-10-Infrastruktur-Kritis>, 5 Agustus 2019.

²¹Ake J. Holmgren, Using Graph Models to Analyze the Vulnerability of Electric Power Networks, Risk Analysis, Vol. 26, No. 4, 2006, hal. 955.

²²John A. Adams, Jr., Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk, Friesen Press, 2015, hal. 96.

²³Stephen J. Collier and Andrew Lakoff, "The vulnerability of vital systems, How 'critical infrastructure' became a security problem", dalam Myriam Dunn Cavelty, Securing the Homeland:

Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, ETH Zurich, 2008, hal. 20.

²⁴Thomas E. Griffith, Jr., Strategic Attack of National Electrical Systems, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1994, hal. 1.

²⁵Ahmad Budi Setiawan, "Peningkatan Keamanan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Pada Smart Grid Sebagai Infrastruktur Kritis", Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6, No. 1, 2016, hal. 61.

²⁶John A. Adams, Jr., Cyber Blackout When the Lights Go Out — Nation at Risk, Friesen Press, 2015, hal. 95.

²⁷Natalie Sambhi, "Guardian, consumer or middleman? The role of the military in Indonesia's energy security", Securing Our Energy, ANU College of Asia & The Pacific, Edition 04, Spring 2018, hal. 45.

²⁸Hao Li, Gary W. Rosenwald, Juhwan Jung, and Chen-Ching Liu, Strategic Power Infrastructure Defense, Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 5, May 2005, hal. 918.

Minister of Defense Attends First Meeting with Indonesian House of Representatives Commission I



Photo Source: Public Relations of MoD

The Minister of Defense of the an honor for him to be able to sit Constitution which is to protect Republic of Indonesia H. Prabowo face to face with members of the all Indonesians and all Indonesian Subianto attended the First Working DPR RI Commission I for the first blood. In the national defense Meeting with the Indonesian House time. The Minister further said that development policy, the Minister of Representatives Commission at this time he was intensively of Defense wants the development I, Monday (11/11) at the House of studying the real conditions of of an integrated national defense Representatives Commission I national defense and learning system, which is also supported Meeting Room, Nusantara II Building all the programs that had been by a strong defense industry that House of Representatives of the planned, running or the programs to can produce defense equipment Republic of Indonesia, Jakarta. The be implemented. "I just served 19th products made in the country. inaugural meeting between Defense day as Minister of Defense, with Minister H. Prabowo Subianto and the Deputy Minister of Defense As for the development of the ranks of the DPR's Commission who only served 17 days. Of course, defense posture, the Defense I was chaired by DPRI Commission there are many things that must be Minister wants the TNI's strength I Chairperson Meutya Hafid. The learned and do inventory problems, to become a respected regional meeting began with the introduction "said the Minister of Defense. power. "We want to realize a strong, proportional state defense that of the Members of Commission I of the Indonesian Parliament and The Minister of Defense is able to ward off and overcome continued to discuss the Work Plan emphasized that the various forms of threats," he said. of the Ministry of Defense. "At this implementation of his duties in the inauguration meeting we want to get a future was based on the Vision Also present accompanied the general picture of national defense and Mission of the President of the Minister of Defense in the inaugural policy from Mr. Prabowo Subianto Republic of Indonesia, namely the meeting with Commission I of the as Minister of Defense for his duties realization of Forward Indonesia Indonesian Parliament, Deputy in accordance with the mandate of that was sovereign, independent Minister of Defense, Sakti Wahyu the Law to bring modern and strong and had a mutual cooperation Trenggono, Secretary General of defense," said Chair of the DPR RI basis. Regarding to the general the Indonesian Ministry of Defense Commission I Meutya Hafid when policy direction of the national Vice Admiral Agus Setiadji S.A.P., opening the meeting. defense, the Minister of Defense M.A., and Inspector General of the explained that the formulation of Defense Ministry of Defense Vice

Meanwhile, starting his remarks, national defense policy rests on Admiral (Ret) Didit Herdiawan and the Minister of Defense said that the country's goals in accordance the Echelon I Officials of the Ministry the opportunity for the first meeting with the mandate of the 1945 of Defense.*** with the DPR RI Commission I was



Photo Source: Public Relations of MoD

Attending ADMM Retreat, RI Minister of Defense Convey Indonesia's Commitment to Achieve Safe, Peaceful and Prosperous Southeast Asia

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia H. Prabowo Subianto together with the Indonesian Ministry of Defense Delegation attended the ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, Sunday (11/17) in Bangkok, Thailand.

At the meeting attended by the ASEAN Defense Ministers, the Indonesian Minister of Defense expressed his desire to strengthen Indonesia's commitment to develop the Southeast Asia region as a region that is resilient, safe, peaceful and prosperous as well as respected by other regions.

According to the Indonesian Minister of Defense, ASEAN has tremendous potential for natural wealth so that it has always been a magnet for the interests of global forces. Besides, ASEAN waters are also the arteries of transportation and world trade.

However, the potential of marine areas in Southeast Asia will be difficult to develop and use optimally if

there is no protection and guarantee of security and safety from each ASEAN member country.

In the midst of an international situation that full of uncertainties, ASEAN must continue to maintain its commitment and connectivity for the common good. In order to realize this, ASEAN must have strong and reliable cooperation, not be easily scattered by short-term interests and the need to maintain commitment to the ASEAN charter.

"ASEAN must not be divided and polarized which will lead to conflict and division. Indonesia is firmly opposed to any state invasion and in any region, especially in Southeast Asia," said the Indonesian Minister of Defense.

Confidence in the strength of ASEAN must begin with ASEAN's independence, especially in the field of defense including cooperation in border sea security, border dispute resolution, the defense industry and

other fields must always prioritize ASEAN centrality.

ASEAN Cooperation within the ADMM-Plus framework, Mallacca Strait Patrol Cooperation, Trilateral Indomalphi in the Sulu and Sulawesi Seas, ASEAN strategic information exchange ASEAN strategic information exchange Our eyes through the mechanism of ADI (ASEAN Direct Communication Infrastructure) have shown the international community about ASEAN's commitment to the realization of a region that is resilient, safe, peaceful and prosperous

ASEAN Must Be a Counterweight in the Indo-Pacific Region

The Indonesian Minister of Defense further added that ASEAN must be able to become a balancing and bridging in the Indo-Pacific region through the ASEAN Indo-Pacific Outlook so that there is no domination of power in the region.



Photo Source: Public Relations of MoD

11 Defence Ministers' Meeting Plus “Sustainable Security”

8 November 2019 | Bangkok, Thailand



Photo Source: Public Relations of MoD

ASEAN through its neutrality and centrality invites all countries in the Indo-Pacific region to share responsibility for regional security, because the Indo-Pacific does not only belong to ASEAN but belongs to the world community.

The Indo-Pacific must not be interpreted only in a free and open context but must also have inclusive, transparent and comprehensive characteristics, bring benefits to the long-term interests of all countries in the region, and be based on a shared commitment to achieve peace, stability and shared prosperity.

Indonesia hopes that security issues in the region such as theft of natural resources, regional violations, smuggling and regional disputes, natural disasters and humanity can be overcome through strong, genuine and sustainable cooperation.

The South China Sea issue that emerged at the moment must be resolved amicably through dialogue and diplomacy forums by pushing the Code of Conduct agreed upon by ASEAN so that it can be accepted by the Chinese state.

At the ADMM Retreat Forum meeting, the Indonesian Minister of Defense further hoped to produce something beneficial for the interests of ASEAN defense cooperation in the future.

"For Indonesia, ASEAN is a forum for building cooperation that is beneficial for peace, stability and development in our region. Through the ASEAN political and security pillars, we can strengthen the security of Southeast Asia, which of course will also be able to improve the welfare of the countries in it," said the Indonesian Minister of Defense ***

Vice Minister of Defense Gives Keynote Speech At the 2019 Goesmart Activity

Indonesian Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono Gives Keynote Speech at Goesmart 2019: Smart City Week "Transformation Toward Smart X: Smart Village, Smart City, Smart Province and Smart Nation", Tuesday (11/19) at the West Hall of ITB Bandung.

The Minister of Defense in Keynote Speech said that in 2045 Indonesia will face 10 major changes at the Global level, where the world's population is estimated to reach 10 billion people. In the same year an estimated 71 percent of total world output was contributed by developing countries with Asia contributing 45 percent. In this vision, Indonesia will come out of the middle-income trap to become a country with high income in 2036. Furthermore, Indonesia will become a developed country with the 5th largest economic power in the world in 2045 with a GDP of USD 74 Trillion.

The Deputy Minister further said that Smart X developers must have



Photo Source: Public Relations of MoD

and understand national security must change to follow the new insights so that the Smart X that is built is able to eliminate or minimize threats to the ideology, politics, ideology, mentality and culture of the community. The solution that is built inside Smart X besides being smart must also have features that can guarantee the safety and security of the community. ***

Unwittingly a wave of change as a result of technological advances is inevitable. Various advances in technology are actually intended to provide convenience and aim to improve the welfare of the community.

The Deputy Minister also said that the people's mindset



Photo Source: Public Relations of MoD

Republic Indonesia Ministry of Defense Wins Award for Public Information Openness as a Public Informative Body



Photo Source: Public Relations of MoD

For the first time the Indonesian Innovator 4.0 Budiman Ministry of Defense received the Sudjatmiko.

2019 Open Public Information Award from the Central Information Commission (KIP). The award Section of KIP hopes that through category received by the Ministry this award there will be innovations of Defense is the Ministry as a Public Informative Body.

The award was held at the Ministry of Communication and Information, Jakarta, Wednesday (11/20), held in the context of the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information.

The award was given by the Chairman of the Institutional Field of KIP Cecep Suryadi to the Head of the Public Information and Library of the Ministry of Defense Captain Hadi Prayitno as the representative of the Indonesian Ministry of Defense witnessed by Commission I M. Farhan and Chairperson of

The Chairman of the Institutional Commission (KIP) hopes that through this award there will be innovations in public information services from public bodies so that it will make it easier for information users.

According to him, in the current

4.0 era, BP is required to provide the best service to the public to improve their personal development and social environment in order to be able to compete globally.

In line with this, the Chairman of KIP Gede Narayana said that the implementation of the award was a manifestation of the implementation of Public Information Openness. ***



Photo Source: Public Relations of MoD

The 48th Korpri Anniversary Ceremony, Vice Minister Read the President's Speech



Photo Source: Public Relations of MoD

Deputy Minister of Defense the key to the bureaucratic reform. (Wamenhan) Kemhan Sakti Wahyu Trenggono became the Inspector of Ceremony (Irup) and read the remarks of the President of the Republic of Indonesia during the increase productivity and be Ceremony of the 48th Korpri results-oriented. "The task of the Anniversary Flag Year 2019, on bureaucracy is to ensure that Friday (29/11), at the Bhinneka Tunggal Ika field Secretariat General development programs are truly of the Ministry of Defense , Jakarta. delivered, the benefits are felt by the people, the services provided

In 2019, the theme of the 48th Korpri Anniversary is "Korpri: Work, ease and speed," stressed the Deputy Minister said that all Korpri members to take the path of change, Indonesia must be sure to be carry out reform in a sustainable manner. "There is no longer an old to be a winning country, the key mindset, no more linear work, and is we want to unite, our National no more routine work, bureaucracy unity and integrity bound to go must change. We must build new forward Indonesia, without unity, values in working quickly to adapt the diversity of our country, will the change, "he said.

All Korpri members continuously move into a breakthrough, continue to innovate. The convoluted complicated services which make it difficult for the people, must be cut off, and the speed of serving is

become the front guard in binding the unity, maintaining kinship as one brother, one nation and one homeland. "We must remember that our country is a big country, a country with 17 thousand islands, with diverse religions, tribes, cultures, and regional languages, a single diverse nation," said the Minister of Defense.

At the end of his remarks, the Minister of Defense revealed that diversity is our strength, pluralism is a gift from God, we must take care and pay more attention on that matters. Have a good day at work, continue your devotion and best work for the people, nation and country. The Secretary General of the Ministry of Defense Vice Admiral Agus Setiadji, S.A.P, M.A., as well as the officials and staff of the Ministry of Defense were present at the ceremony.***

we will become a weak and failure

In this case, the Deputy Minister must be invited all Korpri members who were scattered throughout Indonesia to



Photo Source: Public Relations of MoD

Opened the National Defense Industry Private Products Exhibition, Defense Minister is Optimistic about Defense Industry Independence

Minister of Defense H. Prabowo Subianto accompanied by TNI Commander in Chief Marshal Hadi Tjahjanto officially opened an exhibition of domestic private defense industry products held at the Ministry of Defense office, Jakarta, Tuesday (3/12).

Also present at the exhibition, Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono, Army Chief of Staff General Andika Perkasa, Navy Chief of Staff Admiral Siwi Sukma Adji, Secretary General MoD Vice Admiral Agus Setiadji, Army Strategic and Reserve Command Lieutenant General Besar Harto Karyawan.

In addition to the Ministry of Defense and TNI officials, also attending the exhibition, the Chairperson and several Members of Commission I of the Indonesian Parliament, several National Police officials and other relevant agencies. Furthermore, Defense Attachés from friendly countries were also present.

After official opening, the Minister of Defense had the opportunity to take tour the various types of Defense and Security Equipment (Alphankam) Indonesian home-made products. The exhibition was held by the domestic private defense industry company which is a member of the National Defense and Security Equipment Industry Association (Pinhantanas).

This exhibition is intended to build confidence that the domestic defense and security industry (BUMS) has the ability to provide the needs of users in the field of Defense and Security Industry (Alphankam).

The Defense Minister expressed his optimism that in the next five years the domestic defense industry will be more independent and able to produce defense equipment needed for the interests of national defense.



Photo Source: Public Relations of MoD

According to the Defense Minister the domestic defense industry has experienced a lot of progress, although there are still some that need to be developed further through research and development.

"Thank God, our abilities are very good, very advanced, of course there are parts that we still need to carry out research and development again, but God willing, in five years we will be more independent more standing on our own feet. Now I am proud that we have the ability now," said the Defense Minister.

The Minister further said that increasing the role of the domestic defense industry in every procurement of defense equipment for defense purposes was one of the tasks assigned to him by the President of the Republic of Indonesia.

To support the achievement of the independence of the defense industry, the Minister of Defense emphasized that defense industry companies, both from BUMN and BUMS, work together and have synergy.

The Pinhantanas exhibition which was attended by 24 domestic private Defense Industry (Indhan) companies took the theme "Determination of the Domestic Defense Industry to Support the Development of Indonesia's Defense and Security

Force". A number of Indonesian defense Industry home-made products were exhibited such as ships, unmanned aircraft, tactical vehicles, and bombs.

The 24 companies include CV. Indo Pulley Perkasa, PT Elmas Viana Djaja, PT Sari Bahari, PT Merpati Wahana Raya, PT Burangkeng Maju Teknik, PT Prasandha Dumayasa, PT Bhimasena Global Industrial Technology, PT Bangkit Nata Mandiri Sejahtera, PT Graha Fatta, PT Shipyard, PT Jala Berkah Nusantara Mighty, PT Ridho Agung Mitra Abadi.

Furthermore, PT Karya Your Task, PT Hariiff Daya Tunggal Engineering, PT Komodo Armament Nusantara, PT Samudera Wiwaca Kusuma, PT Batamec, PT Kadomas Aviasindo, CV Maju Mapan, PT Karimun Anugerah Sejati, PT Caputra Mitra Sejati, PT Langit Biru Parasut, PT Daya Radar Utama and PT Bandar Abadi. ***

